

**REKRUTMEN KADER PEREMPUAN DALAM PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA DI ACEH**

SKRISPI

Diajukan Oleh:

Syukur Haldi Wijaya

Nim. 200801014



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2024/2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Syukur Haldi Wijaya
NIM : 200801014
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 24 Oktober 2001
Alamat : Pagarair, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari terdapat tuntutan atau bukti yang menunjukkan pelanggaran terhadap pernyataan yang disampaikan sebelumnya, peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2024
Menyatakan



**REKRUTMEN KADER PEREMPUAN DALAM PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

SYUKUR HALDI WIJAYA

NIM. 200801014

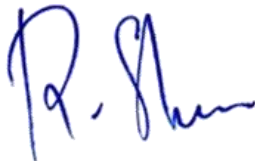
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/di munaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I



Rizkika Lhena Darwin, M.A

NIP. 198812072018032001

**REKRUTMEN KADER PEREMPUAN DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DI ACEH**

SKRIPSI

SYUKUR HALDIWIJAYA

NIM. 200801014

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 06 Desember 2024

04 Jumadil Akhir 1446 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Rizkika Lhena Darwin, M.A

NIP. 198812072018032001

Sekretaris,



Lidva, S.IP.

Penguji I,



Mumtazinur, S.IP., M.A

NIP. 198609092014032002

penguji II,



Arif Akbar, M.A

NIP. 199110242022031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. MUJI MULIA, M.Ag

NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Rekrutmen Kader Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera di Aceh merupakan bagian dari upaya partai untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Dalam konteks politik Aceh, yang memiliki dinamika sosial dan budaya yang khas, rekrutmen kader perempuan menghadirkan tantangan tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pola rekrutmen, peluang, dan tantangan proses rekrutmen kader perempuan dalam DPW Partai Keadilan Sejahtera di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, studi dokumentasi untuk menganalisis data dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pola rekrutmen kader perempuan di PKS Aceh telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. rekrutmen kader perempuan di DPW PKS Aceh juga menawarkan berbagai peluang yang mendukung keterlibatan dan pengembangan perempuan dalam politik. Meskipun terdapat pola dan peluang yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik, implementasinya sering kali menghadapi kendala serius. Tantangan utama muncul dari adanya stigma eksternal dan internal. Stigma eksternal dari masyarakat yang masih menganggap politik sebagai ranah laki-laki mempengaruhi dukungan sosial terhadap perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Sementara itu, stigma internal mencerminkan rasa kurang percaya diri dan kekhawatiran terhadap kemampuan diri sendiri dalam politik. Kedua jenis stigma ini menciptakan hambatan yang saling memperkuat, membuat proses rekrutmen kader perempuan menjadi lebih menantang meskipun ada kebijakan dan peluang yang mendukung. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang, pengalaman langsung, dan pemahaman informan dalam rekrutmen kader perempuan dalam partai keadilan sejahtera di Aceh.

Kata Kunci : *Rekrutmen kader, Perempuan, Partai keadilan sejahtera.*

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang sudah memberikan segala nikmat dan karunia serta petunjuk-Nya sepanjang perjalanan akademik ini. Shalawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Rekrutmen Kader Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Di Aceh*”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dan pemerolehan gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Maka dalam hal ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Karnidi dan Ibunda Halimahtun Sa'diah yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, serta cinta kasih tanpa syarat. Skripsi ini secara khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudari tercinta: kakak-kakak Caca Mutiara dan Cici Permatasari.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku pembimbing I yang sudah membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kepada bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Sekretaris prodi Ilmu Politik
5. Penasehat Akademik Ibu Melly Masni, M.I.R dan seluruh Bapak dan Ibu dosen di lingkungan FISIP yang sudah tulus dan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis selama ini serta seluruh staf FISIP UIN Ar-Raniry.

6. Seluruh informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penelitian yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dan seluruh pihak yang terlibat dalam skripsi ini.
7. Dengan penuh rasa syukur, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman saya, baik yang berada di bangku perkuliahan maupun di luar bangku perkuliahan, yang telah memberikan dukungan tanpa henti selama proses penulisan skripsi ini.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ilda Latifa atas dukungan dan bantuan yang luar biasa penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kehadiran dan dorongan nya yang senantiasa menemani di setiap langkah.

Dengan doa dan usaha serta dukungan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis merasa tidak mampu membalas semua bantuan yang sudah diberikan oleh keluarga, Bapak/ Ibu, dan teman-teman. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang sudah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk meningkatkan kualitas penulisan ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi amalan yang bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 8 Agustus 2024

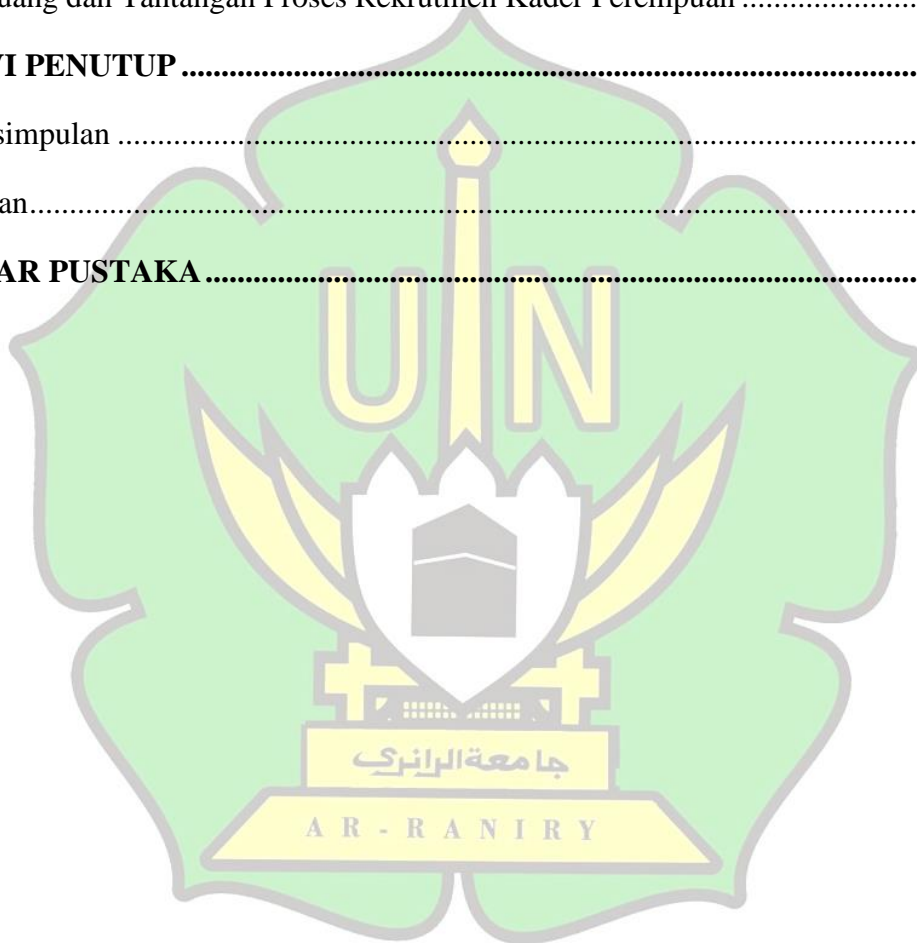
Syukur Haldi Wijaya

NIM. 200801014

DAFTAR ISI

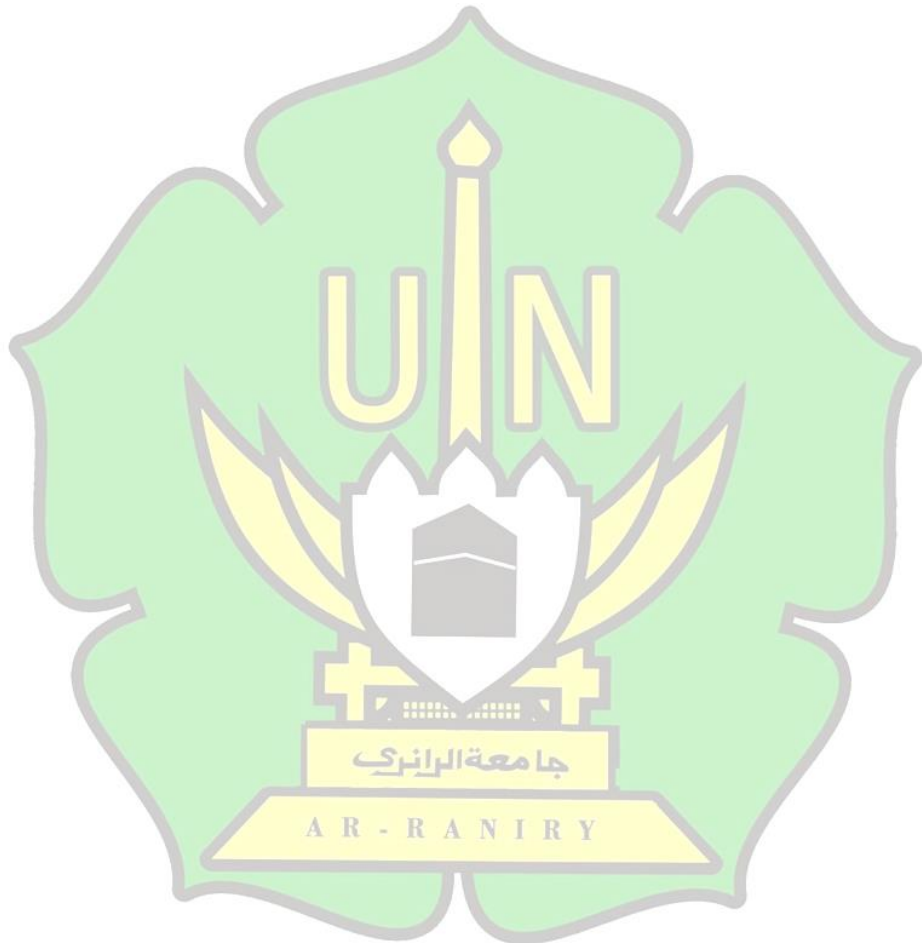
LEMBAR JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	10
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Pendekatan Penelitian	19
3.2 Fokus Penelitian	19
3.3 Lokus Penelitian.....	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.5 Teknik Analisis Data.....	21

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 Gambaran umum PKS Provinsi Aceh.....	23
4.2 Gambaran Divisi dalam Struktur PKS Aceh	38
4.3 Rekrutmen Kader Perempuan	44
4.4 Peluang dan Tantangan Proses Rekrutmen Kader Perempuan	56
BAB VI PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71



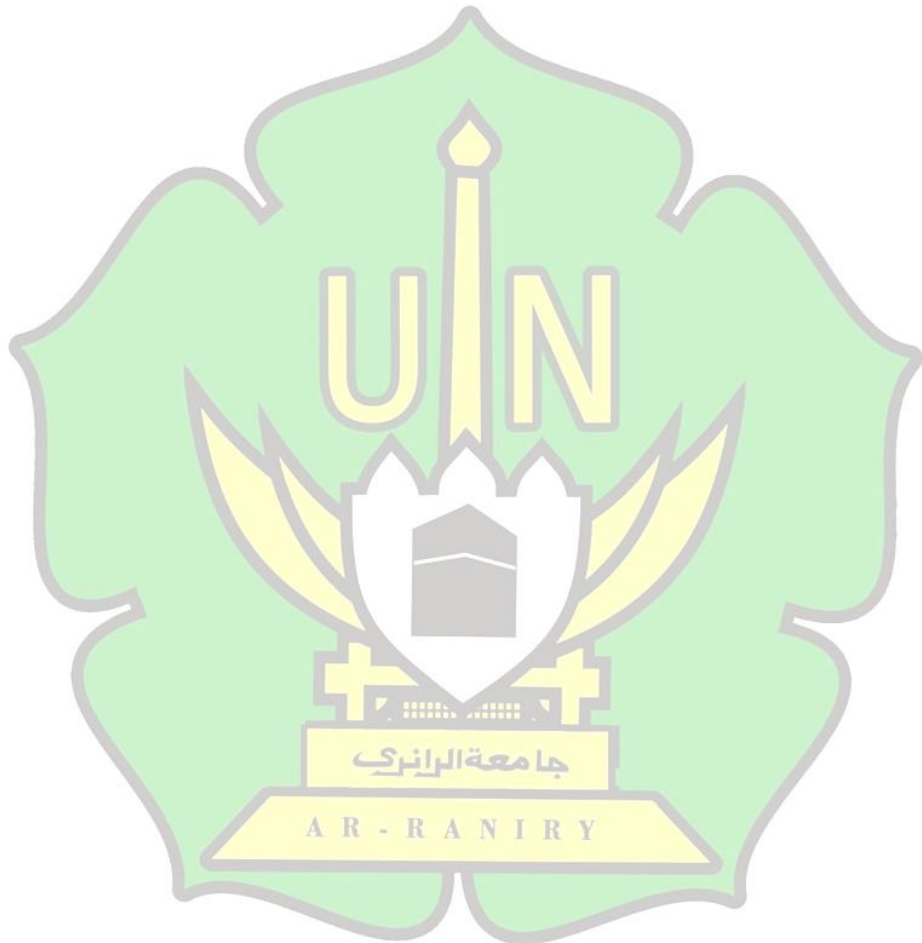
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian.....	21
Tabel 1.2 Komposisi Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Aceh	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	17
Gambar 1.2 Struktur dan Kepengurusan PKS Aceh.....	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pertanyaan Penelitian	74
Lampiran 1.2 Surat Penelitian	76
Lampiran 1.3 Dokumentasi Wawancara.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang dijadikan slogan oleh partai politik. Tatanan kehidupan umat manusia yang di dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Di dalam tatanan itu perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas kedua) yang berada di bawah prioritas laki-laki yang membawa implikasi luas dalam kehidupan Social di masyarakat. Perempuan selalu di anggap bukan makhluk penting melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dan untuk kepentingan laki-laki.

Kiprah perempuan dalam politik memiliki makna bahwa perempuan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam penelitian ini erat kaitannya dominasi laki-laki dengan tersubordinasi nya perempuan. Partai politik adalah salah satu wadah bagi setiap politisi untuk melangkah. Di dalam partai politik dominasi laki-laki dapat ditemui pada kepengurusan inti yang diisi oleh satu atau dua perwakilan perempuan. Baik perempuan ataupun laki-laki dalam prinsipnya langkah mereka menuju dunia politik hampir sama. Mereka membutuhkan partai politik sebagai kendaraan.¹

Opsi kebijakan yang menjadi pilihan utama adalah Kebijakan afirmasi (*affirmative action*). Kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik mulai diterapkan setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dan dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Kebijakan afirmasi ini dilakukan dengan memberikan berbagai ketentuan kepada partai politik yang akan mengikuti kontestasi politik di bidang pemilihan calon legislatif. Ketentuan yang paling sederhana adalah dengan cara memberikan syarat dan prasyarat agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan

¹ Zahara, R. R., & Teuku, M. (2018). Partisipasi perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 (Studi di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur). *JPP (Jurnal Politik dan Pemerintahan)*, 3(1), 81–98.

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.²

Penerapan *affirmative action* terhadap perempuan dalam politik dan Pemilu ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu. Keterwakilan perempuan terus meningkat seiring dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menekankan perlunya *affirmative action* tersebut. Peningkatan keterwakilan perempuan yang lebih signifikan saat aturan dalam pemilu diberlakukan pada sistem penetapan bakal calon anggota DPR dan DPRD oleh partai politik. Di samping penerapan kuota perempuan 30%, bakal calon perempuan tersebut harus diletakkan pada 1 (satu) di antara 3 (tiga) bakal calon.³

Berbicara tentang perempuan dan pemilu, merupakan bahasan yang menarik. Sebab, peran politik perempuan dari perspektif kalangan feminisme radikal adalah dimana terjadinya transformasi total, peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Atau dalam bahasa populer nya, kesetaraan gender. Keterlibatan wanita di kancah politik bukan hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita, partisipasi wanita dalam pembangunan, telah banyak kemajuan yang telah dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang pemerintahan.⁴

Partisipasi perempuan dalam partai politik sangat tinggi baik dalam kepengurusan, pertemuan organisasi, pemberian suara, kampanye, diskusi-diskusi politik, dan rapat-rapat umum yang selama ini banyak dilakukan oleh partai politik yang ada. Namun permasalahan dasar politik perempuan adalah ketidakadilan yang lahir akibat adanya kesenjangan yang terjadi antara hak politik

² Amier, A. (2023). Keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia: Studi kasus tentang perolehan suara perempuan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Makassar [Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin]. *Institutional Repository Universitas Hasanuddin*.

³ Andre Pratama, Y., Rachmad Soetijono, I., & Budi Arundhati, G. Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Dalam Menghadapi Pemilu 2014 Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia.

⁴ Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106–116.

perempuan dan peran serta posisi politiknya dengan hak politik dan peran politik laki-laki. Adapun peran perempuan dalam partai politik yaitu selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kepengurusan.

Kendala-kendala yang dialami perempuan dalam partai politik yaitu melalui beberapa persoalan antara lain pendidikan, pekerjaan, keadilan dan kesetaraan gender, peran domestik, budaya patriarki, agama dan hubungan kekeluargaan. Semua yang tercatat ini adalah masalah yang sering dihadapi perempuan dalam berpartai politik hampir pada semua partai.⁵

Dalam konteks representasi politik perempuan di Indonesia, maka problem soal besar kecilnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat ditentukan dan tergantung dari parpol. Artinya bahwa parpol mempunyai posisi penting dalam rangka rekrutmen dan kandidasi terhadap politisi perempuan. Dalam konteks ini, parpol selalu dianalogikan sebagai gatekeeper, yaitu institusi politik yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan seleksi dan kandidasi terhadap politisi perempuan.

Adapun yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah proses oleh partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak sebatas hanya untuk mencari anggota baru, tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan publik. Rekrutmen politik juga dimaknai luas, sebagai cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara guna untuk diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.⁶

Data KPU pada pemilu legislatif sejak tahun 2004 hingga tahun 2014 menunjukkan tren peningkatan terhadap calon legislatif perempuan. Bertolak dari data Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI yang diajukan partai politik

⁵ Habibah, S. (2015). Partisipasi dan peran perempuan dalam partai politik. *Al-Maiyyah*, 8(2), 342–366.

⁶ Fitriyah, F. (2020). Partai politik, rekrutmen politik dan pembentukan dinasti politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17.

peserta pemilu, terlihat bahwa jumlah calon legislatif perempuan mengalami peningkatan apabila pada tahun 2004 persentase jumlah caleg perempuan mencapai angka 33,00 persen dari keseluruhan caleg, pada tahun 2009 mencapai 34,60 persen, dan meningkat menjadi 37,33 persen dan pada tahun 2014 juga meningkat menjadi 37 persen. Hal ini juga terlihat dari angka keterwakilan caleg perempuan yang terus meningkat yakni pada tahun 2004 memperoleh 61 kursi dari total 550 Kursi di DPR (setara 11,09 persen kursi). Selanjutnya hasil pemilu 2009, memperlihatkan adanya peningkatan angka keterwakilan perempuan dengan mendapatkan 101 kursi dari total 560 kursi di parlemen (setara dengan 17,86 persen). Walaupun kemudian hasil pemilu 2014 justru menunjukkan adanya sedikit penurunan angka keterwakilan perempuan dengan hasil perolehan kursi perempuan menjadi 97 kursi dari 560 kursi (setara dengan 17,32 persen). Hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa ada peningkatan representasi perempuan menjadi 20 persen pada tingkat DPR-RI. Setelah hasil pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif selesai, nama-nama anggota DPR RI pada periode 2019-2024 sudah bermunculan. Dari 575 Anggota DPR RI yang terpilih ada 118 perempuan yang terpilih atau sebesar 20,5%. Tentu ini adalah capaian tertinggi yang pernah di raih Indonesia terkait representasi perempuan di politik, meskipun kenaikannya tidak signifikan tetapi tentu ini perlu di apresiasi tentang kenaikan presentasi representasi perempuan di parlemen. Hasil Pemilu DPR 2024 diproyeksikan meningkatkan angka keterwakilan perempuan menjadi 22,1% atau 128 kursi dari 580 kursi DPR. Angka ini lebih tinggi 1,6% dibanding Pemilu 2019 dengan keterwakilan perempuan 20,5% (118/575). Hasil Pemilu DPR 2024 pun menjadi capaian keterwakilan perempuan tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia.⁷

Dalam konstalasi politik Aceh, keterwakilan perempuan masih belum menggembirakan. Dalam lembaga legislatif, tercatat hanya 9 orang yang menduduki di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari hasil pelaksanaan

⁷ Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi politik perempuan pada lembaga legislatif: Studi tentang pencalonan perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019. *ARISTO*, 9(2), 203–228.

pemilu legislatif (Pileg) 2019-2024. Minimnya kaum perempuan yang terlibat dalam panggung politik Aceh disebabkan karena sejumlah kendala. Baik itu dari internal berkaitan dengan kompetensi personal kaum perempuan itu sendiri maupun secara eksternal yang sebagaimana pengaruh Kultur yang masih dianggap perempuan tidak boleh berperan dalam ranah publik (politik), karena itu hanya menjadi wilayah kaum laki-laki.⁸

Salah satu organisasi-organisasi yang memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan adalah partai politik salah satunya PKS. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir sebagai sebuah partai politik yang tampilannya berbeda dibandingkan dengan partai politik yang ada. Mengingat PKS sebagai partai politik tidak hanya mengedepankan aspek politis dalam sepekan terangnya, tapi juga menjadikan moral agama sebagai basis gerakannya. Sehingga tidak jarang PKS dijuluki sebagai partai politik dakwah atau partai politik yang tampilannya lebih dirasakan sebagai gerakan dakwah.⁹

PKS Satu-satunya Parpol Penuhi Kuota Perempuan Caleg DPR RI, Bukti Serius Berikan Peran Besar pada Perempuan. Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dr Kurniasih Mufidayati mengutarakan bersyukur PKS menjadi satu-satunya partai yang memenuhi kuota 30 persen keterwakilan Caleg Perempuan untuk DPR RI pada Pemilu 2024 di semua Dapil.

Dr Kurniasih Mufidayati menyebut keterwakilan perempuan dalam Pemilu benar-benar dipersiapkan dengan matang oleh PKS. Dr Kurniasih Mufidayati mengatakan dukungan dari pimpinan partai yang sangat besar dan juga besarnya jumlah Anggota Perempuan PKS menjadi modal besar bagi PKS dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan Caleg Perempuan.

⁸ Damayanti, T. (2021). Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik di Aceh: Keberadaan anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tahun 2019–2024 [Doctoral dissertation, UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin]. *Institutional Repository Universitas Hasanuddin*.

⁹ Andani, M., Taqwa, R., & Suleman, Z. (2019). Rekrutmen dan Kaderisasi Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Oleh Partai Keadilan Sejahtera. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(3), 427-444.

Sebagai partai berbasis kader serta mengusung nilai-nilai Islam Rahmatan Lil ‘aalamin, caleg perempuan PKS bisa dipenuhi dari proses kaderisasi dan keterbukaan PKS menerima bergabung nya para tokoh perempuan.¹⁰

Hal ini menarik untuk diteliti PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan terhadap seluruh anggota, kader, dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan secara terbuka melalui infrastruktur kelembagaan partai yang tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Fungsionalisasi partai berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia dalam internal kepartaian.

Dalam kajian ini penulis mengambil objek penelitian yaitu berfokus pada PKS di Aceh. Peneliti merasa tertarik pada Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam rekrutmen kader perempuan dalam partai keadilan sejahtera di aceh yang sesuai kaitannya dengan cita-cita PKS.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola rekrutmen kader perempuan dalam partai keadilan sejahtera di Aceh?
2. Bagaimana peluang dan tantangan proses rekrutmen kader perempuan dalam partai keadilan sejahtera di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola rekrutmen kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera di Aceh.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan proses rekrutmen kader perempuan dalam partai keadilan sejahtera di Aceh.

¹⁰ Dewan pengurus pusat, partai keadilan sejahtera, <https://pks.id/>, diakses pada tanggal 7 April 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini di harapkan dapat memberikan nilai (value), baik secara teoritis maupun praktis terhadap Rekrutmen Kader Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera di Aceh.

1. Secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian ilmu politik, khususnya penelitian dalam kehidupan masyarakat. Saya berharap dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian masa depan.
2. Secara praktis: penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan wawasan bagi masyarakat terhadap Rekrutmen Kader Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera di Aceh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun dari beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Penelitian Aminah, Sri Mulyani, dan Ubaidullah (2020), berjudul “Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menemukan bahwa Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pola rekrutmen yang dilakukan PKS dalam memenuhi kuota 30% perempuan pada pemilu tahun 2019, kedua partai menggunakan pola rekrutmen tertutup dan terbuka, dimana PKS lebih cenderung unggul dalam mempersiapkan kader perempuan. Indikator yang digunakan PKS dalam menentukan bakal calon legislatif perempuan yang diusung pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh adalah lebih cenderung melihat seseorang yang loyal dan mampu bersama-sama dengan partai untuk saling berjuang dan mengetahui tujuan dari kepartaian itu sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PKS menggunakan pola rekrutmen calon dengan sistem terbuka dan tertutup model Barber dan selalu memperhatikan sumber motivasi dan peluang masing-masing calon.¹¹

Penelitian Eri Haryati (2017), berjudul “Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan menemukan informasi mengenai suatu topik/masalah yang belum dipahami sepenuhnya. Penelitian ini menemukan bahwa, partisipasi politik perempuan di PKS Kabupaten Jepara cukup baik, dilihat dari terlaksananya 4 indikator yaitu:

¹¹ Aminah, A., Mulyani, S., & Ubaidullah, U. (2020). Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh. *Jurnal Sosiologi USK*.

(1) Kontribusi perempuan yang cukup baik, ditandai dengan jumlah kader perempuan yang saat ini mencapai 30% dari jumlah keseluruhan kader dan pelayanan yang rutin dilakukan oleh kader perempuan kepada masyarakat;

(2) Pemberdayaan perempuan yang sudah baik ditandai dengan pemberian pengetahuan lobi, negosiasi dan kampanye bagi kader perempuan.

(3) Pengorganisasian perempuan yang cukup baik ditandai dengan kebebasan berkompetisi laki-laki dan perempuan serta pengajuan caleg dari PKS yang memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil;

(4) Peran perempuan dalam memengaruhi kebijakan yang cukup baik, ditandai dengan partai menghargai dan memperhitungkan suara perempuan. Sedangkan untuk keterwakilan politik perempuan dalam internal partai memang masih rendah, ditandai dengan perempuan yang belum pernah duduk di posisi strategis internal partai dan juga belum pernah berhasil mendapatkan kursi di parlemen.¹²

Penelitian Cholida Eka Anggraini, Joko Sutarso, dan Budi Santosa (2017), berjudul “Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus Pdi dan Pks Kota Surakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling untuk menentukan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, arsip, dan observasi langsung. Penelitian ini menemukan bahwa Dalam proses rekrutmen calon legeslatif PDI Perjuangan melakukan penelitian yang berupa penilaian, survey, dan riset kelayakan bagi tiap-tiap calon yang diajukan oleh masyarakat. Calon legislatif terpilih melalui pertimbangan dari pengabdian anggota kepada partai. Adapun PKS menggunakan pemilihan umum internal kader di setiap daerah pemilihan untuk menentukan calon legislatif. Hal ini diyakini bahwa setiap

¹² Haryati, E. (2017). Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*.

kader pada daerah pemilihan telah mengetahui dengan baik kinerja kader lainnya yang berada dalam satu wilayah.¹³

Dari berbagai penelitian terkait yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat kesamaan pada fokus penelitian, yaitu rekrutmen kader perempuan dalam partai politik, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan metode penelitian yang digunakan, ruang lingkup kajian, dan konteks sosial budaya yang diangkat.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada yang secara khusus membahas pola, peluang, dan tantangan rekrutmen kader perempuan dalam DPW PKS Aceh dengan menekankan aspek gender, konteks lokal Aceh, dan dinamika internal partai. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada eksplorasi yang lebih mendalam terhadap rekrutmen kader perempuan di DPW PKS Aceh dengan mempertimbangkan tantangan struktural, budaya lokal, serta strategi yang digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik.

2.2 Landasan Teori

Dengan dasar teori, penelitian dapat diperkuat secara deduktif untuk menjamin bahwa informasi dan hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis. Jadi, para analis akan lebih mudah menguraikan suatu fenomena atau keajaiban sosial sebagai perbandingan dengan data yang ditemukan oleh para analis. Hipotesis yang digunakan peneliti akan diawali dengan hipotesis umum yang kemudian dilanjutkan dengan spekulasi-spekulasi yang lebih khusus untuk mendukung penelitian tersebut. Oleh sebab itu kerangka teori yang digunakan adalah :¹⁴

2.2.1 Tantangan Menghadapi Pencalonan Perempuan di Partai Politik

¹³ Anggraini, C. E., Sutarso, J., & Santosa, B. (2014). Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP Dan PKS Kota Surakarta. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

¹⁴ Melli, A. W. (2021). Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Mengembangkan Bahasa Anak Autis Di Tk Intan Pertiwi Tanjung Senang Bandar Lampung. *Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung*.

Julie Ballington dalam tulisannya “Strengthening Internal Political Party Democracy: Candidate Recruitment from a Gender Perspective” mengemukakan umumnya perempuan tidak di diskriminasi secara formal pada awal proses di sebagian besar negara tidak ada hambatan hukum bagi perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Meskipun kelompok kelayakan pada awal proses biasanya lebih dari 50 persen, pada akhir proses proporsinya menurun drastis. Oleh karena itu, rendahnya keterwakilan perempuan disebabkan oleh hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan pada berbagai tahap proses, termasuk konteks budaya dan politik yang berbeda.

Menurut Julie Ballington dalam karyanya “Strengthening Internal Political Party Democracy: Candidate Recruitment from a Gender Perspective” terdapat indikator dalam mengukur tantangan menghadapi pencalonan perempuan di partai politik yaitu :

- a. Sistem Pemilu : Jelas terlihat bahwa jenis sistem pemilu dapat sangat mempengaruhi peluang perempuan untuk terpilih. Meskipun sistem pemilu saja tidak menentukan tingkat keterwakilan perempuan, sistem ini penting karena sistem ini dapat berubah, dan selalu berubah. Dibandingkan dengan status budaya perempuan dalam masyarakat atau tingkat pembangunan, peraturan pemilu lebih mudah diubah dan mungkin ditawarkan peluang untuk melibatkan perempuan dalam jangka pendek. Sistem keterwakilan proporsional dipandang sebagai sistem yang paling ‘ramah perempuan’.
- b. Konteks budaya : Dalam masyarakat yang sangat patriarki dan tradisional, perempuan yang mencari posisi kepemimpinan sering kali mengalami diskriminasi dan memandang politik sebagai sesuatu yang bermusuhan dan agresif. Pola sosialisasi di banyak negara pasca-konflik menekankan politik sebagai ranah laki-laki, dan banyak pemilih memandang laki-laki sebagai pemimpin yang lebih baik dibandingkan perempuan. Hukum adat sering kali menegaskan bahwa laki-laki seringkali menjadi kepala rumah

tangga dan lebih siap dalam mengambil keputusan, terutama di daerah pedesaan. Nilai-nilai budaya tradisional menghambat kemajuan, kemajuan dan partisipasi perempuan dalam proses politik apa pun.

- c. Partai-partai politik : Partai-partai politik sangat bervariasi di berbagai negara dan sistem pemilu dalam hal jumlah kandidat perempuan yang mereka nominasikan, peringkat mereka dalam daftar partai, dan proporsi yang mereka kirimkan ke parlemen. Mereka juga berbeda-beda dalam hal luasnya partisipasi dan sentralisasi atau desentralisasi prosesnya.
- d. Organisasi Partai : Dengan lemahnya organisasi internal dan aturan rekrutmen yang tidak jelas, keputusan diambil oleh segelintir elit, biasanya laki-laki. Perempuan biasanya berada di luar dan dikucilkan jaringan 'semua laki-laki'. Meskipun tidak jarang terdapat perempuan yang berada di dalam, namun jumlah mereka sedikit, dan mendorong keterwakilan perempuan yang lebih besar jarang dilihat sebagai tujuan partai. Sistem patronase cukup tertutup dan kemungkinan besar tidak menguntungkan perempuan.
- e. Kelompok Kandidat Perempuan : Para pemimpin partai politik sering berargumen bahwa jumlah perempuan yang bersedia mencalonkan diri dalam pemilu tidak cukup karena mereka kurang memiliki pengalaman dan kepercayaan diri untuk mencalonkan diri. Hal ini terutama terjadi di negara-negara pasca-konflik yang dipengaruhi oleh rezim yang mendahuluinya di rezim yang sangat termiliterisasi atau otoriter seperti yang ada di Amerika Latin, hanya sedikit perempuan yang memegang jabatan dan kadang-kadang hanya ada sedikit perempuan yang dimobilisasi. Rezim mungkin menekan ranah politik konvensional, seringkali melarang aktivitas serikat pekerja, partai politik, dan gerakan masyarakat sipil. Ketika sebagian besar perempuan dikesampingkan dalam proses transisi, hal ini dapat mengakibatkan ketidakhadiran mereka dalam

proses pemilu pasca-konflik kecuali jika partai politik secara aktif merekrut anggota perempuan ke dalam jajaran mereka..

f. Berkampanye : Aspek lain yang mungkin mempengaruhi pencalonan perempuan adalah pendanaan kampanye pemilu dan pengaruh uang dalam proses pemilu. Perempuan biasanya memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki pada umumnya, hal ini terutama terlihat di negara-negara pasca-konflik. Diperlukan dana dalam jumlah tertentu untuk menjamin pencalonan suatu partai politik. Tantangan pendanaan juga berlaku bagi laki-laki, namun ada beberapa alasan mengapa memperoleh sumber daya keuangan khususnya bermasalah bagi perempuan.

- 1) Hambatan Psikologis: Sosialisasi gender masih menjadi hambatan bagi banyak perempuan, terutama dalam masyarakat patriarki tradisional di mana laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama dan lebih terbiasa mengumpulkan uang untuk keperluan mereka sendiri. Perempuan yang sering kali terdegradasi ke ranah privat biasanya tidak terbiasa menggalang dana untuk kepentingan pribadi.
- 2) Jaringan: Laki-laki cenderung memiliki jaringan bisnis dan profesional yang lebih luas yang dapat menyediakan sumber daya finansial dan keahlian. Struktur jaringan yang didominasi laki-laki dalam partai politik sering kali mengecualikan perempuan, menghambat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Perempuan yang memiliki akses lebih baik ke sumber daya biasanya adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan politisi terkenal.
- 3) Uang Awal dan Nominasi: Pendanaan awal yang diperlukan untuk meluncurkan kampanye pencalonan sering kali menjadi hambatan besar bagi perempuan. Penghasilan perempuan yang

lebih rendah dibandingkan laki-laki membuat mereka kurang mampu mengeluarkan dana pribadi untuk kampanye.

- 4) Kelangkaan Sumber Daya: Di banyak negara berkembang, kurangnya dana untuk membayar biaya pencalonan yang kecil sekalipun dapat mengecualikan perempuan dari proses pemilu. Partai baru atau partai yang tidak memiliki perwakilan di parlemen sering kali mengalami kesulitan mengakses pendanaan publik.¹⁵

2.2.2 Rekrutmen Berbasis Gender

Melody Crowder-Meyer Gender dalam tulisannya “Gendered Recruitment without Trying: How Local Party Recruiters Affect Women’s Representation” mengidentifikasi bahwa perbedaan gender dalam politik sering kali disebabkan oleh kurangnya representasi perempuan dalam jabatan politik. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya keterwakilan perempuan ini termasuk bias pemilih, stereotip gender, dan dominasi laki-laki dalam struktur kekuasaan partai.

Adapun indikator dari rekrutmen berbasis gender dalam karyanya yang terkenal “Gendered Recruitment without Trying: How Local Party Recruiters Affect Women’s Representation” oleh Melody Crowder-Meyer Gender yaitu :

- a. Gender : Melody Crowder-Meyer membahas bagaimana partai politik dapat memengaruhi keterwakilan perempuan dalam politik melalui proses rekrutmen mereka. Salah satu poin utama adalah bahwa meskipun partai politik aktif dalam rekrutmen, mereka sering kali tidak secara eksplisit mencoba untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Akibatnya, jaringan dan metode rekrutmen yang digunakan cenderung mendukung kandidat laki-laki lebih sering daripada perempuan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dominasi laki-laki dalam kepemimpinan partai dan jaringan sosial yang digunakan untuk mencari kandidat.

¹⁵ Ballington, J. (2004). Strengthening internal political party democracy: Candidate recruitment from a gender perspective.

- b. Ambisi Politik : Rekrutmen partai dapat meningkatkan ambisi politik, terutama bagi mereka yang didorong oleh aktor politik untuk mencalonkan diri. Namun, perempuan sering kali menunjukkan ambisi politik yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dorongan dan dukungan yang mereka terima dari jaringan politik yang ada. Ketika perempuan didorong untuk mencalonkan diri, mereka lebih mungkin untuk mempertimbangkan pencalonan mereka, tetapi tanpa dorongan tersebut, mereka cenderung tidak mencalonkan diri.
- c. Perekrutan : Crowder-Meyer menekankan pentingnya rekrutmen dalam menentukan siapa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan. Partai lokal memiliki berbagai cara untuk merekrut kandidat, termasuk melalui jaringan sosial, iklan, dan surat massal. Perekrutan aktif melalui jaringan sosial yang inklusif terhadap perempuan dapat membantu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, metode rekrutmen yang kurang personal seperti iklan atau surat massal cenderung tidak efektif dalam menarik kandidat perempuan, karena mereka sering kali merasa kurang percaya diri atau kurang memenuhi syarat untuk posisi tersebut.¹⁶

2.2.3 Tanggapan terhadap Rekrutmen

Jessica Robinson Preece, Olga Bogach Stoddard, dan Rachel Fisher dalam tulisannya "Run, Jane, Run! Gendered Responses to Political Party Recruitment" mengemukakan tentang bagaimana partai politik dapat merekrut lebih banyak perempuan ke dalam politik dengan memahami perbedaan respons gender terhadap upaya rekrutmen yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung kurang responsif terhadap ajakan untuk mencalonkan diri dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya rasa percaya diri, persepsi negatif tentang kemampuan mereka sendiri, dan tanggung jawab domestik yang lebih besar.

¹⁶ Crowder-Meyer, M. (2013). Gendered recruitment without trying: How local party recruiters affect women's representation.

Perempuan sering merasa kurang memenuhi syarat untuk terlibat dalam politik, meskipun sebenarnya mereka memiliki kualifikasi yang sama dengan laki-laki. Rasa percaya diri yang rendah ini membuat mereka ragu untuk merespons ajakan rekrutmen. Selain itu, beban tanggung jawab domestik yang lebih besar pada perempuan juga membuat mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki waktu atau energi untuk terlibat dalam politik.

Jessica Robinson Preece, Olga Bogach Stoddard, dan Rachel Fisher dalam tulisannya "Run, Jane, Run! Gendered Responses to Political Party Recruitment" juga menunjukkan bahwa pendekatan rekrutmen yang lebih personal dan mendukung dapat meningkatkan respons perempuan terhadap rekrutmen politik. Misalnya, ajakan individu yang menunjukkan dukungan konkret dan menawarkan bantuan spesifik dapat membuat perempuan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terlibat. Selain itu, partai politik yang menyediakan pelatihan, sumber daya, dan jaringan yang mendukung perempuan akan lebih berhasil dalam merekrut kader perempuan.¹⁷

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan.¹⁸ Pada penelitian ini, penulis menganalisis tentang rekrutmen kader perempuan dalam partai keadilan sejahtera di Aceh. Peneliti menggunakan teori rekrutmen berbasis gender, tanggapan terhadap rekrutmen, dan tantangan menghadapi pencalonan perempuan di partai politik sebagai acuan dan parameter untuk meneliti penelitian ini.

Maka, dengan konsep tersebut mampu mendukung penelitian dan mengulas bagaimana pola rekrutmen, peluang, dan tantangan kader perempuan dalam dpw partai keadilan sejahtera di Aceh.

¹⁷ Preece, J. R., Stoddard, O. B., & Fisher, R. (2016). Run, Jane, run! Gendered responses to political party recruitment.

¹⁸ Aulia, J. Penyusunan Kerangka Berpikir Dalam Penelitian. *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

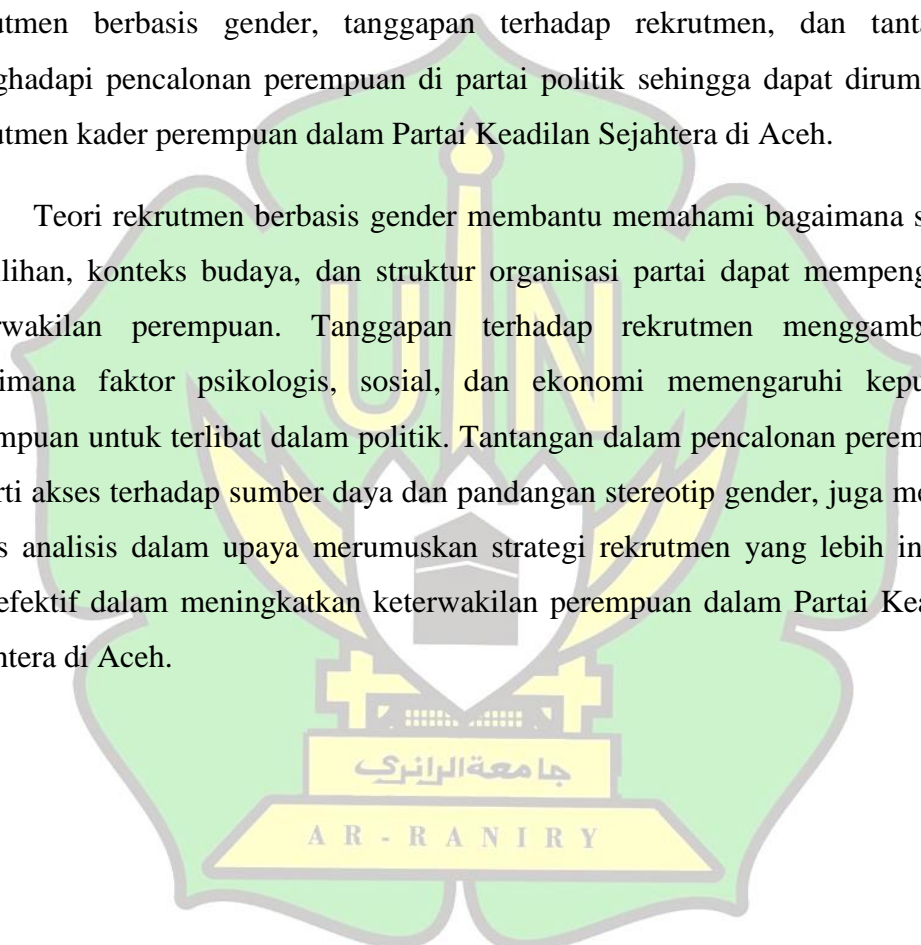


Keterangan :

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa judul ini dilatarbelakangi dengan pola, Peluang, dan tantangan rekrutmen kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera di Aceh.

Dengan demikian, pembahasan ini perlu diteliti menggunakan teori rekrutmen berbasis gender, tanggapan terhadap rekrutmen, dan tantangan menghadapi pencalonan perempuan di partai politik sehingga dapat dirumuskan rekrutmen kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera di Aceh.

Teori rekrutmen berbasis gender membantu memahami bagaimana sistem pemilihan, konteks budaya, dan struktur organisasi partai dapat mempengaruhi keterwakilan perempuan. Tanggapan terhadap rekrutmen menggambarkan bagaimana faktor psikologis, sosial, dan ekonomi memengaruhi keputusan perempuan untuk terlibat dalam politik. Tantangan dalam pencalonan perempuan, seperti akses terhadap sumber daya dan pandangan stereotip gender, juga menjadi fokus analisis dalam upaya merumuskan strategi rekrutmen yang lebih inklusif dan efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera di Aceh.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Menurut I Made Winartha, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Metode ini berfungsi untuk menggambarkan Rekrutmen Kader Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera di Aceh.¹⁹

3.2 Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini difokuskan pada Rekrutmen Kader Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera di Aceh, di karena PKS yang dikenal sebagai partai politik Islam konservatif di Indonesia. Studi tentang rekrutmen kader perempuan dalam partai ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana partai politik dengan orientasi ideologis tertentu mendukung partisipasi perempuan dalam politik.

3.3 Lokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan.²⁰ Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Aceh, yang mana Aceh memiliki konteks budaya, agama, dan politik yang unik di Indonesia. Sebagai satu-satunya provinsi yang

¹⁹ Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi, B. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 31-54.

²⁰ Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif* (Qualitative research approach). Deepublish.

menerapkan hukum syariah di Indonesia, Aceh memiliki dinamika politik yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Dengan melakukan penelitian di Aceh, yang mana dapat memahami bagaimana faktor-faktor lokal ini memengaruhi rekrutmen kader perempuan dalam PKS.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang ada dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat melalui bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi suatu objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan, laporan hasil kerja serta berupa foto ataupun dokumen elektronik(rekaman).²¹

b. Wawancara

Referensi lain penulis dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam satu situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi. Informasi penelitian yang berupa data diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian.

Dalam kata lain wawancara juga merupakan pertemuan antara penulis dengan informan penelitian atau pemberi data, yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk itu jawaban responden menjadi data yang dikembangkan oleh penulis.

²¹ Assingkily, M. S. (2021). Metode Penelitian Pendidikan (Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir). Penerbit K-Media.

²² Penulis melakukan wawancara dengan anggota kader PKS di Aceh dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

Tabel 1.1 Informan Penelitian

Nama	Jabatan
Ismunandar	Bidang Kaderisasi
Nova Zahara	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
Tati Mutia Asmara	Politisi Perempuan
Fauzi	Ketua DPD Aceh Barat
Dian Huriana	Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada
Ahmad Abdullah Rahil Bin Irwansyah	Caleg laki-laki

c. Observasi

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaborator nya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Untuk mendapatkan hasil yang efektif, penulis melakukan pengamatan di Aceh. Hasil

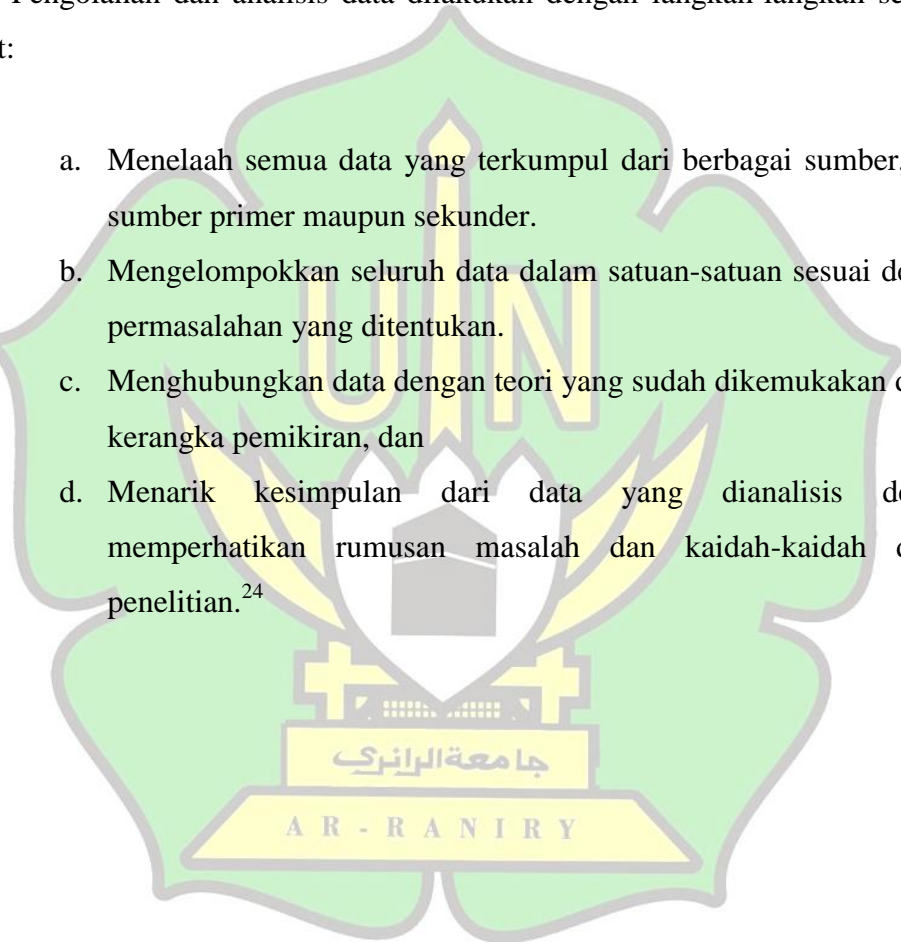
²² Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.

yang di harapkan dapat mencatat respon dan reaksi anggota perempuan PKS terhadap berbagai kegiatan, strategi, atau inisiatif yang dilakukan oleh partai. Ini dapat membantu memahami persepsi dan pengalaman mereka dalam partai.²³

3.5 Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan permasalahan yang ditentukan.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, dan
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah dalam penelitian.²⁴



²³ Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif. Pt Kanisius.

²⁴ Majid, A. (2017). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Penerbit Aksara Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum DPW PKS Provinsi Aceh

Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Aceh telah ada sejak tahun 1998, dan pada awalnya dipimpin oleh M. Nasir Jamil sebagai ketua pertamanya. Dalam perkembangannya, DPW PKS Aceh mengelola 23 Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Aceh, termasuk DPD di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sigli, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Jaya, Meulaboh, dan Abdy. Sebagai bagian dari struktur partai, DPW PKS Aceh bersama DPD-nya memiliki peran penting dalam mewujudkan visi partai.²⁵

PKS, sebagai partai dakwah, memiliki visi umum untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa. Visi ini kemudian dijabarkan lebih spesifik dalam visi khusus, yaitu menjadikan PKS sebagai partai yang berpengaruh baik dari segi kekuatan politik, partisipasi, maupun opini publik dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Keterkaitan antara visi umum dan visi khusus ini menggambarkan komitmen PKS untuk membangun struktur politik yang kuat dan terintegrasi, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses politik yang adil dan sejahtera. Visi umum dan khusus Partai Keadilan Sejahtera berorientasikan pada terwujudnya Partai Keadilan Sejahtera sebagai:

1. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran agama Islam di jamin dalam proses pembangunan umat Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.

²⁵ Arrasyid, S., & Abidin, Z. (2020). Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera tahun 1998–2017. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 5(1).

2. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatat lil`alamin*.
3. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.²⁶

Peran Partai keadilan Sejahtera Aceh sebagai partai dakwah.

1. Sebagai Partai Dakwah penegak Keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai Persatuan Umat dan bangsa.
2. Partai Berpengaruh Baik secara kekuatan Politik, partisipasi maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.
3. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam Sebagai solusi Kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang
5. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil alamin.
6. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.
7. Menyebar luaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
8. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
9. Membangun opini umum yang islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
10. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
11. Menegakkan amar makruf nahi mungkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika.

²⁶ Mahtuti, T. (2018). Konsistensi PKS Dalam Memperjuangkan Harkat Dan Martabat Perempuan (Studi Pada: DPD PKS Lampung Utara). *Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung*.

12. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhwah Islamiyah dan wihdatul ummah dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
13. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap muslim yang tertindas.²⁷

Adapun visi, misi dan tujuan Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah ialah sebagai berikut : Visi: Menjadi Partai Dakwah yang kokoh dan Transformatif untuk melayani bangsa. Misi :

- 1) **Capacity Building:** Meningkatkan kuantitas dan kualitas kader agar mampu merealisasikan tujuan-tujuan dakwah dan mampu mengelolanya.
- 2) **Institution Building:** Mengokohkan struktur partai untuk menghantarkan kader dan institusi dakwah pada peran optimalnya dalam merealisasikan tujuan-tujuan dakwah.
- 3) **Social Building:** Mengokohkan peran yang diambil sebagai perekat umat dan pemersatu bangsa secara konseptual dan operasional.
- 4) **Political Building:** Meningkatkan akseptabilitas partai dalam rangka mengokohkan peran dan posisi dakwah pada peta politik lokal, nasional dan internasional.
- 5) **Nation Building:** Mengelola dan memobilisasi sumber daya bangsa secara optimal untuk kemajuan umat bangsa dan negara.

Tujuan :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang di ridhoi Allah Subhanahu wata'ala, dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁷ Arrasyid, S., & Abidin, Z. (2020). Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998–2017. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 5(1).

2. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, bermartabat, bertanggung jawab, peduli, sejahtera, dan bahagia di negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, berwibawa, dan bertanggungjawab berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, hukum perundang-undangan serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia.²⁸

Latar belakang berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Aceh, awal mula dibentuk di tahun 1998, yang diajak oleh pengurus pusat mengajak seluruh aktivis dakwah di Aceh dari kampus IAN Ar Raniry dan kampus Unsyiah, dari kalangan aktivis dakwah yang menyetujui untuk di buat partai. Bahkan, ketika telah menjadi Partai Keadilan Sejahtera, tampak terjadi penguatan ideologi dan agenda Islami yang lebih nyata dan artikulatif. Dalam konteks penggeseran ini Partai Keadilan Sejahtera menjadi semakin dekat dengan Ikwanul Muslimin ini terlihat pada keterusterangan Partai keadilan Sejahtera dalam menerapkan ideologi Islam dan memperjuangkan berlakunya sistem sosial Islam, sistem politik Islam, dan penerapan Syariat Islam sebagai hukum formal negara. Landasan pergerakan apa yang dipakai oleh Partai Keadilan Sejahtera di Aceh sistem kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Aceh.

Landasan pergerakan yang di pakai Partai Keadilan Sejahtera di Aceh menggunakan dasar Islam dan termaksud dalam ajaran pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Partai keadilan sejahtera juga mengusung tinggi pemahaman Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Islam tidak dapat dipisahkan dengan politik, juga umat Islam harus berperan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan dalam mengelola dan memajukan suatu daerah dan negara.

²⁸ Jahar, A. S. Peran partai Keadilan sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Lebak.

Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di Aceh diawali dengan memberikan pemahaman tentang tauhid dengan pembentukan halaqah, kelompok-kelompok pengajian yang dibina dan dibimbing oleh satu orang murabbi, dengan diberikan pemahaman Islam, kepemimpinan, sirah nabawiyah, sirah sahabiyah dan bedah kitab hadits Alwafi kitab syarah Arbagin Anawawiyah, selain bentuk pembinaan dan pengajian proses kaderisasi lainnya dengan proses penyaluran bakat dan minat para kader. Pogram pengembangan kepemimpinan bertujuan untuk menyiapkan kepemimpinan: Struktural, Fungsional, Legeslatif, Eksikatif dan Publik agar berkerja sesuai dengan tugas dan fungsinya mewujudkan visi dan misi partai yakni Mewujudkan Masyarakat madani yang Adil, Sejahtera dan Bermatabat.

Gambaran umum DPW PKS Provinsi Aceh, yang berlandaskan pada visi dakwah dan transformasi nilai-nilai Islam, tampak memiliki potensi besar dalam mendorong keadilan dan kesejahteraan di berbagai bidang, termasuk dalam konteks gender. Sebagai partai yang mengusung visi masyarakat madani yang adil dan sejahtera, serta berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai keadilan universal, PKS Aceh secara implisit dapat dianggap memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender dalam struktur dan aktivitas politiknya. Meskipun sistem kaderisasi yang berbasis halaqah dan penguatan tauhid menekankan pembentukan kepemimpinan Islami, penting bagi PKS untuk juga memperluas fokusnya pada peran perempuan dalam kepemimpinan dan politik. Hal ini sejalan dengan upaya PKS sebagai "partai dakwah" yang berpengaruh, sehingga menciptakan ruang inklusif yang lebih besar bagi kader perempuan untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat madani. Dengan demikian, pengembangan kapasitas kader perempuan dan penerapan prinsip keadilan gender dalam semua aspek kepemimpinan akan memperkuat komitmen PKS dalam menegakkan keadilan tidak hanya secara sosial, tetapi juga gender, sejalan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.²⁹

²⁹ Arrasyid, S., & Abidin, Z. (2020). Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998–2017. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 5(1).

4.1.1 Komposisi Kepengurusan DPW Partai Keadilan Sejahtera Aceh

Komposisi keseluruhan kepengurusan antara laki-laki dan perempuan merujuk pada pembagian peran dalam struktur organisasi partai politik berdasarkan gender. Ini mencakup perbandingan jumlah anggota kepengurusan laki-laki dan perempuan dalam berbagai posisi, baik di tingkat kepemimpinan maupun divisi-divisi tertentu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat tingkat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai, serta memahami sejauh mana partai politik menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam struktur organisasinya.

Komposisi keseluruhan kepengurusan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh menunjukkan keterwakilan perempuan yang mencapai 46%. Ini merupakan indikator kuat bahwa partai ini mulai mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Angka ini tidak hanya menunjukkan bahwa hampir setengah dari posisi strategis di partai tersebut diisi oleh perempuan, tetapi juga mencerminkan upaya yang lebih luas dalam mendorong representasi gender yang lebih seimbang dalam dunia politik, yang biasanya didominasi oleh laki-laki.

Keterwakilan perempuan sebesar 46% dalam kepengurusan ini dapat dianggap sebagai pencapaian yang penting dalam konteks partai politik di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Aceh, di mana faktor-faktor budaya dan sosial sering kali mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam politik. Keikutsertaan perempuan dalam hampir setengah dari struktur kepemimpinan di DPW PKS Aceh juga menunjukkan bahwa partai ini memberikan perhatian yang serius terhadap isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.³⁰

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Dian Huriana, staf DPW PKS bidang pemenangan pemilu dan pilkada, pada tanggal 2 agustus 2024.

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam posisi kepengurusan tidak hanya penting dalam hal simbolik, tetapi juga substansial. Perempuan yang berada dalam posisi kepemimpinan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan, strategi, dan arah politik partai. Dengan keterwakilan perempuan yang mencapai hampir 50%, suara perempuan akan semakin didengar dalam proses pengambilan keputusan partai, yang tentunya akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan partai yang lebih sensitif terhadap isu-isu perempuan.

Partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai juga memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat, khususnya dari kalangan perempuan, terhadap partai politik. Keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan menjadi contoh konkret bagi perempuan lainnya bahwa keterlibatan aktif dalam politik bukanlah hal yang mustahil. Ini juga membantu membuka jalan bagi generasi perempuan muda yang ingin berkontribusi lebih dalam politik dan kepemimpinan.

Secara keseluruhan, keterwakilan perempuan sebesar 46.43% dalam kepengurusan DPW PKS Aceh merupakan langkah maju yang signifikan. Ini memperlihatkan bahwa partai telah berkomitmen untuk memajukan kesetaraan gender dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas kepemimpinan di dalam partai tetapi juga memberikan contoh bagi partai politik lain di Indonesia untuk mengikuti jejak yang serupa dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik.

4.1.2 Komposisi Jabatan dalam Kepengurusan DPW Partai Keadilan Sejahtera Aceh

Komposisi jabatan dalam kepengurusan partai politik yaitu mencakup berbagai posisi yang dibentuk untuk memastikan fungsi organisasi berjalan dengan baik. Dalam kepengurusan partai, ada pembagian tugas yang terstruktur untuk menangani berbagai bidang dan kepentingan partai.³¹

Di dalam DPW PKS Aceh, representasi perempuan di posisi strategis menjadi barometer penting dalam menilai sejauh mana partai ini berkomitmen terhadap keadilan gender. Posisi strategis meliputi jabatan-jabatan yang berpengaruh besar dalam menentukan kebijakan partai, termasuk Ketua Bidang, Sekretaris, Bendahara, dan berbagai peran penting lainnya dalam struktur partai. Jika perempuan hanya diwakili secara minim atau terbatas dalam posisi-posisi ini, maka hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan. Keadilan gender dalam representasi ini tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga dengan kualitas peran yang dimainkan oleh perempuan dalam partai. Perempuan harus diberikan kesempatan yang sama untuk memimpin, berinovasi, dan mempengaruhi kebijakan, sama seperti rekan-rekan laki-laki mereka. Jika hanya segelintir perempuan yang memegang posisi strategis, sementara mayoritas peran kepemimpinan dipegang oleh laki-laki, maka ini bisa menciptakan dinamika yang tidak seimbang dalam proses pengambilan keputusan.

Keputusan yang diambil tanpa masukan yang cukup dari perspektif perempuan mungkin tidak sepenuhnya responsif terhadap isu-isu yang relevan bagi perempuan dan, pada gilirannya, bisa memperlebar kesenjangan gender di dalam partai dan masyarakat. Berikut gambar tabel memperlihatkan representasi perempuan dan laki-laki di DPW PKS Aceh.

³¹ Areza, T. S. M., Akbar, F., Ikhsan, E., & Nasution, M. (2023). Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1276-1286.

Gambar 1.2 Struktur dan Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh 2020-2025

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera
 Nomor : 045.PW.2/SKEP/DPP-PKS/2022
 Tanggal : 06 Dauhijah 1443 H/07 Juli 2022 M

**STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN
 DEWAN PENGURUS WILAYAH
 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
 PROVINSI ACEH
 MASA BAKTI 2020-2025**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Makhyaruddin Yusuf
2.	Sekretaris	Zaenal Abidin
3.	Bendahara	Muhammad Nafis
Bidang Kaderisasi		
4.	Ketua	Ismunandar
5.	Sekretaris	Iwan Sulaiman
Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga		
6.	Ketua	Nova Zahara
7.	Wakil Ketua	Endang Sumiati
Bidang Kepemudaan		
8.	Ketua	Erlanda Juliansyah Putra
9.	Wakil Ketua	Afnan Nur Azizah
Bidang Kepanduan		
10.	Ketua	Dedi Suffriadi
11.	Wakil Ketua	Mutia Yanita
Bidang Pemenangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah		
12.	Ketua	Faisal
13.	Wakil Ketua	Dian Huriana
Bidang Hubungan Masyarakat		
14.	Ketua	Bardan Sahidi
15.	Wakil Ketua	Cut Kasmina Fitriani
Bidang Seni Budaya		
16.	Ketua	Nourman Hidayat
17.	Wakil Ketua	Debby Harnie
Bidang Hukum, Politik dan Keamanan		
18.	Ketua	Muhammad Arnif
19.	Wakil Ketua	Nurul Fitri

Bidang Ketenagakerjaan



4

Bidang Ketenagakerjaan		
20.	Ketua	Armiyadi
21.	Wakil Ketua	Laisa Nastha Roshadi
Bidang Kesejahteraan Sosial		
22.	Ketua	Purnama Setia Budi
23.	Wakil Ketua	Faizah Nur'adilah
Bidang Keummatan dan Dakwah		
24.	Ketua	Adifal Susanto, S.TP
25.	Wakil Ketua	Dewi Hasmawati
Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader		
26.	Ketua	Munardi Naswar
27.	Wakil Sekretaris	Asliyanti Eliya
Bidang Tani, Nelayan dan Pembinaan Desa		
28.	Ketua	Surya Mutiara
29.	Sekretaris	Rahmawati

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 06 Rajab 1442 H
 18 Februari 2021 M

**DEWAN PENGURUS PUSAT
 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Presiden,

AHMAD SYAIKHU

Sekretaris Jenderal,

ABOE BAKAR ALHABSYI

Salinan disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
2. Ketua Majelis Perimbangan Pusat;
3. Ketua Dewan Syariah Pusat; dan
4. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumbagut.

Sumber : Partai Keadilan Sejahtera

Dalam menganalisis profil gender di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Aceh, penting untuk memahami bagaimana distribusi gender mempengaruhi struktur kepemimpinan. Profil gender ini menggambarkan seberapa besar perwakilan perempuan dan laki-laki di berbagai posisi dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dinamika internal dan efektivitas organisasi.

1) Komposisi Jabatan Struktural

Komposisi Jabatan Struktural mengacu pada susunan atau distribusi posisi-posisi resmi dalam suatu organisasi yang bersifat hierarkis. Ini mencakup bagaimana jabatan-jabatan atau peran-peran tertentu dibagi dan diatur di dalam struktur organisasi, serta siapa yang menduduki jabatan-jabatan tersebut. Komposisi jabatan struktural biasanya mencerminkan hierarki kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut.³² Dalam konteks partai politik, seperti DPW PKS Aceh, jabatan struktural di PKS DPW Aceh meliputi posisi-posisi yang berperan penting dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Dalam organisasi politik seperti PKS, posisi-posisi ini mencakup Ketua dan Sekretaris MPW, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW, serta ketua dan wakil ketua di berbagai bidang. Berikut adalah rincian distribusi gender berdasarkan struktur di atas dalam posisi kepemimpinan di PKS DPW Aceh.

Tabel 1.2 Komposisi Kepengurusan DPW Partai Keadilan Sejahtera Aceh

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Ketua MPW	Laki-laki	1
2	Sekretaris MPW	Laki-laki	1

³² Ambarwati, A. (2021). *Perilaku dan teori organisasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	Jumlah
3	Ketua DPW	Laki-laki	1
4	Sekretaris DPW	Laki-laki	1
5	Bendahara DPW	Perempuan	1
6	Ketua Bidang Kaderisasi	Laki-laki	1
7	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi	Laki-laki	1
8	Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga	Perempuan	1
9	Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga	Perempuan	1
10	Ketua Bidang Kepemudaan	Laki-laki	1
11	Wakil Ketua Bidang Kepemudaan	Laki-laki	1
12	Ketua Bidang Kepanduan	Laki-laki	1
13	Wakil Ketua Bidang Kepanduan	Perempuan	1
14	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada	Laki-laki	1
15	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada	Perempuan	1
16	Ketua Bidang Hubungan Masyarakat	Laki-laki	1
17	Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat	Perempuan	1
18	Ketua Bidang Seni Budaya	Laki-laki	1
19	Wakil Ketua Bidang Seni Budaya	Perempuan	1
20	Ketua Bidang Hukum, Politik dan Keamanan	Laki-laki	1
21	Wakil Ketua Bidang Hukum, Politik dan Keamanan	Perempuan	1

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	Jumlah
22	Ketua Bidang Ketenagakerjaan	Laki-laki	1
23	Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan	Perempuan	1
24	Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial	Laki-laki	1
25	Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial	Perempuan	1
26	Ketua Bidang Keummatan dan Dakwah	Laki-laki	1
27	Wakil Ketua Bidang Keummatan dan Dakwah	Perempuan	1
28	Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader	Laki-laki	1
29	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader	Perempuan	1
30	Ketua Bidang Tani, Nelayan dan Pembinaan Desa	Laki-laki	1
31	Wakil Ketua Bidang Tani, Nelayan dan Pembinaan Desa	Perempuan	1
32	Ketua DSW	Laki-laki	1
33	Sekretaris DSW	Laki-laki	1

Berdasarkan tabel distribusi gender dalam posisi kepemimpinan PKS DPW Aceh menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kemajuan, laki-laki masih mendominasi posisi strategis dan pengambilan keputusan. Dari total 33 posisi kepemimpinan yang ada, 20 di antaranya diisi oleh laki-laki dan 13 oleh perempuan. Angka ini, walaupun mencerminkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan dibandingkan dengan beberapa organisasi serupa, masih menunjukkan bahwa perempuan kurang terwakili dalam posisi-posisi strategis.

Ketidakseimbangan gender ini dapat memengaruhi dinamika pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di dalam organisasi. Dengan mayoritas posisi strategis diisi oleh laki-laki, ada kemungkinan besar bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih cenderung mencerminkan perspektif laki-laki. Ini berpotensi mengabaikan kepentingan dan kebutuhan perempuan secara mendalam, meskipun keterlibatan 13 perempuan dalam posisi kepemimpinan dapat memberikan harapan bahwa pandangan mereka akan lebih diperhatikan. Perempuan yang berada dalam posisi strategis berperan penting dalam memastikan bahwa keberagaman perspektif termasuk pandangan perempuan tercermin dalam pembuatan kebijakan, yang dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kekurangan representasi perempuan dalam struktur kepemimpinan.

Perempuan di PKS DPW Aceh saat ini menduduki beberapa posisi penting yang menunjukkan adanya langkah-langkah positif menuju peningkatan keterwakilan mereka. Beberapa posisi yang dipegang oleh perempuan termasuk Bendahara DPW dan Wakil Ketua di berbagai bidang, seperti Bidang Hubungan Masyarakat, Pemenangan Pemilu dan Pilkada, serta Hukum, Politik, dan Keamanan. Meskipun kemajuan ini patut diapresiasi, perempuan masih sering menempati posisi sebagai wakil ketua dibandingkan posisi utama seperti ketua. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam keterwakilan perempuan di posisi-posisi strategis.

Secara keseluruhan, meskipun PKS DPW Aceh telah membuat beberapa langkah positif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, tantangan yang ada menunjukkan bahwa pencapaian keseimbangan gender yang optimal masih memerlukan usaha yang berkelanjutan. Perluasan kesempatan dan dukungan untuk perempuan dalam meraih posisi strategis akan berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan representatif bagi seluruh anggota organisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Nova Zahara, selaku staf Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di DPW PKS Aceh.

"Dalam pandangan saya sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, profil gender di PKS DPW Aceh menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Saat ini, perempuan memegang 13 dari 33 posisi kepemimpinan, termasuk beberapa posisi penting seperti Bendahara DPW dan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Ini merupakan peningkatan yang mengembirakan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Namun, masih ada ketidakseimbangan gender yang jelas terlihat. Sebagian besar posisi strategis utama seperti Ketua MPW dan Ketua DPW masih dipegang oleh laki-laki. Ini mencerminkan adanya tantangan struktural dan budaya yang terus menghambat perempuan dari menduduki posisi-posisi utama tersebut. Keterbatasan ini seringkali mengurangi pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang penting".³³

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa poin penting muncul terkait profil gender di PKS DPW Aceh. Secara umum, ada pandangan yang positif mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam hal keterwakilan perempuan dalam organisasi. Posisi-posisi penting yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki kini mulai diisi oleh perempuan, menunjukkan adanya langkah-langkah positif menuju kesetaraan gender. Hal ini mencerminkan komitmen partai dalam membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif di ranah politik. Meski demikian, pandangan ini tidak sepenuhnya menutupi kenyataan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan yang cukup mencolok, terutama dalam pengisian posisi strategis utama yang masih banyak dipegang oleh laki-laki. Pandangan ini menyoroti bahwa meskipun ada kemajuan, pekerjaan besar masih perlu dilakukan untuk mencapai keseimbangan yang lebih proporsional antara laki-laki dan perempuan dalam struktur kepemimpinan partai.

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Nova Zahara, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, pada tanggal 11 Agustus 2024.

Wawancara tersebut juga menyoroti dominasi laki-laki dalam posisi-posisi puncak, seperti Ketua MPW dan Ketua DPW, yang mengindikasikan bahwa tantangan struktural masih menjadi penghalang signifikan bagi perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Dominasi ini tidak hanya mencerminkan preferensi tradisional dalam pemilihan pemimpin, tetapi juga mengungkapkan adanya hambatan-hambatan yang secara sistemik membatasi akses perempuan ke posisi kepemimpinan tertinggi. Hambatan-hambatan ini dapat bersifat kultural, di mana norma-norma sosial masih cenderung mendukung laki-laki sebagai pemimpin, atau bersifat institusional, di mana prosedur dan mekanisme seleksi yang ada mungkin tidak sepenuhnya mendukung keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang penting tetap terbatas, yang bisa berdampak pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, yang mungkin kurang memperhatikan perspektif dan kepentingan perempuan.

Secara keseluruhan, kedua analisis ini memperlihatkan bahwa meskipun PKS DPW Aceh telah mencatat beberapa kemajuan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di berbagai posisi kepemimpinan, tantangan yang dihadapi masih cukup signifikan, terutama dalam mencapai keseimbangan gender yang ideal. Upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan di posisi strategis memang sudah mulai menunjukkan hasil, namun ketidakseimbangan yang ada, terutama di posisi-posisi puncak, menandakan bahwa perjuangan untuk mencapai representasi yang lebih setara masih jauh dari selesai.

Kedua sumber informasi, baik dari hasil pengamatan distribusi gender maupun wawancara yang dilakukan, secara bersama-sama memberikan wawasan yang mendalam dan menyeluruh mengenai situasi profil gender dalam organisasi ini. Hasil pengamatan distribusi gender mengungkapkan gambaran yang jelas tentang dominasi laki-laki dalam struktur kepemimpinan, sementara wawancara memberikan konteks yang lebih mendetail mengenai bagaimana tantangan-tantangan tersebut dirasakan oleh individu-individu yang terlibat langsung.

Kombinasi dari kedua sumber informasi ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif, memungkinkan kita untuk memahami tidak hanya apa yang terjadi dalam hal distribusi gender, tetapi juga mengapa ketidakseimbangan ini terus bertahan dan bagaimana hambatan-hambatan tersebut mungkin dapat diatasi. Dengan demikian, meskipun ada indikasi positif mengenai peningkatan peran perempuan, kenyataan bahwa masih ada ketimpangan yang cukup mendalam menunjukkan perlunya usaha yang lebih berkelanjutan dan konsisten dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

4.2 Gambaran Divisi dalam Struktur DPW PKS Aceh untuk Mendukung dan Memberdayakan Kader Perempuan

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga dalam struktur Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola isu-isu yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga. Bidang ini berfungsi sebagai wadah yang mengoordinasikan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, menjaga kesejahteraan keluarga, serta memperkuat nilai-nilai yang mendukung stabilitas sosial dan agama.

Dalam struktur Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) di DPW PKS Aceh, terdapat empat divisi utama yang berperan krusial dalam mendukung dan memberdayakan kader perempuan. Masing-masing divisi ini memiliki tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan secara komprehensif. Empat divisi tersebut terdiri dari:

1. Divisi Ketahanan Keluarga

Divisi Ketahanan Keluarga berfokus pada penguatan ketahanan keluarga kader perempuan sebagai dasar untuk keberhasilan mereka dalam peran politik dan sosial. Tujuan utama divisi ini adalah menciptakan lingkungan yang

mendukung dan stabil bagi kader perempuan dengan menggalakkan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Divisi ini mengorganisir pelatihan dan program yang membantu kader perempuan menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dengan peran mereka dalam politik, serta menyediakan dukungan dalam bentuk konseling dan bimbingan keluarga. Dengan memperkuat ketahanan keluarga, divisi ini bertujuan untuk mengurangi beban yang mungkin memengaruhi kinerja kader perempuan dan mendukung mereka untuk berkontribusi lebih efektif dalam struktur partai.

2. Divisi Hubungan Kelembagaan

Divisi Hubungan Kelembagaan di DPW PKS Aceh memainkan peran sentral dalam memperkuat dan membangun kemitraan strategis yang sangat penting untuk mendukung pemberdayaan kader perempuan. Tugas utama divisi ini adalah untuk mengelola dan memperluas hubungan dengan berbagai lembaga yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu perempuan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Dengan menjalin kemitraan yang strategis, divisi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan tambahan yang diperlukan, memperluas jaringan kolaborasi, dan menciptakan berbagai peluang yang bermanfaat bagi kader perempuan.

Divisi ini memfokuskan upayanya pada penciptaan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Hubungan dengan lembaga pemerintah, misalnya, memungkinkan divisi untuk mengakses kebijakan dan program-program yang mungkin mendukung inisiatif pemberdayaan perempuan. Melalui kerja sama ini, kader perempuan dapat mendapatkan informasi terkini tentang kebijakan yang relevan serta peluang dukungan dari pemerintah, seperti bantuan finansial atau program pelatihan.

Selain itu, hubungan dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga masyarakat berfungsi untuk memperluas cakupan program-program pemberdayaan yang dapat diakses oleh kader perempuan. Organisasi non-pemerintah sering kali memiliki program-program khusus yang dirancang untuk memberdayakan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan program pengembangan kepemimpinan. Dengan menjalin kemitraan dengan NGO, Divisi Hubungan Kelembagaan dapat memanfaatkan sumber daya dan pengalaman organisasi tersebut untuk memperkuat program-program internal PKS yang berfokus pada kader perempuan.

Divisi ini juga terlibat dalam partisipasi aktif dalam inisiatif bersama dengan berbagai lembaga tersebut. Melalui kolaborasi ini, divisi dapat berkontribusi pada proyek-proyek yang memiliki dampak langsung pada pemberdayaan perempuan, serta memperoleh pengetahuan dan pengalaman berharga dari berbagai pihak. Inisiatif bersama ini bisa berupa seminar, workshop, atau kampanye kesadaran yang bertujuan untuk meningkatkan visi dan misi pemberdayaan perempuan dalam politik. Dengan berpartisipasi dalam inisiatif bersama, kader perempuan juga mendapatkan eksposur lebih besar dan kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek yang dapat meningkatkan profil mereka di tingkat lokal maupun nasional.

Selain menjalin kerja sama untuk program-program pemberdayaan, Divisi Hubungan Kelembagaan memastikan bahwa kader perempuan mendapatkan akses yang lebih luas ke sumber daya dan informasi yang relevan. Hal ini mencakup penyediaan informasi tentang kesempatan pelatihan, beasiswa, dan program pengembangan profesional yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga mitra. Dengan akses yang lebih baik ke sumber daya ini, kader perempuan dapat memperluas keterampilan dan pengetahuan mereka, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk berperan secara efektif dalam politik.

3. Divisi Kajian

Divisi Kajian di DPW PKS Aceh memegang peranan yang krusial dalam mendalami isu-isu perempuan dan menyelaraskannya dengan visi serta misi partai. Tugas utama divisi ini adalah melakukan penelitian dan kajian yang mendalam terkait tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam politik. Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, divisi Kajian mengimplementasikan serangkaian kegiatan yang melibatkan analisis data yang komprehensif dan penilaian kondisi sosial politik yang relevan.

Salah satu fokus utama dari Divisi Kajian adalah untuk menghasilkan informasi yang mendalam dan relevan mengenai berbagai isu yang memengaruhi kader perempuan. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik, termasuk faktor-faktor yang menghambat atau mendukung keterlibatan mereka. Dengan pendekatan yang berbasis data, divisi ini dapat mengidentifikasi pola-pola, tantangan, serta peluang yang ada di lapangan. Analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi yang dihadapi kader perempuan dan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif.

Selain itu, divisi ini juga menilai kondisi sosial politik secara menyeluruh untuk memahami konteks yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan dalam politik. Kajian ini mencakup evaluasi terhadap faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, dinamika sosial, serta persepsi publik mengenai peran perempuan dalam politik. Dengan memahami konteks ini, divisi dapat mengembangkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan relevan, yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Divisi Kajian memainkan peran penting dalam mendukung pemberdayaan kader perempuan. Rekomendasi

ini disusun berdasarkan temuan dari kajian dan analisis yang dilakukan, serta ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan dan program-program internal partai. Dengan adanya dasar ilmiah yang kuat, rekomendasi ini memberikan panduan strategis untuk pengambilan keputusan dalam partai, serta membantu dalam merancang program-program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan kader perempuan.

Melalui kajian yang sistematis, Divisi Kajian tidak hanya memberikan informasi yang penting bagi pengambilan keputusan strategis, tetapi juga menyebarluaskan temuan yang dapat mempengaruhi kebijakan dan program-program pemberdayaan di tingkat yang lebih luas. Informasi dan rekomendasi yang disediakan oleh divisi ini berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung keterlibatan perempuan dalam politik.

4. Divisi Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan

Divisi Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan memiliki peran kunci dalam DPW PKS Aceh dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi kader perempuan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. Tujuan utama dari divisi ini adalah untuk memastikan bahwa kader perempuan tidak hanya memiliki kemampuan yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam peran mereka di partai, tetapi juga untuk berperan dengan baik dalam politik secara umum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Divisi Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan menyelenggarakan berbagai jenis program pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan kader perempuan. Pelatihan kepemimpinan menjadi salah satu program utama, di mana kader perempuan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan memimpin dan membuat keputusan strategis yang diperlukan dalam posisi politik. Program ini tidak hanya

mencakup teori kepemimpinan tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang berharga melalui simulasi dan studi kasus.

Selain pelatihan kepemimpinan, divisi ini juga menyelenggarakan kursus manajerial yang bertujuan untuk membekali kader perempuan dengan keterampilan manajerial yang esensial. Kursus ini mencakup berbagai topik, termasuk perencanaan strategis, pengelolaan proyek, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Keterampilan ini sangat penting untuk menjalankan tugas sehari-hari dalam struktur partai dan untuk mengelola kampanye politik dengan sukses.

Program pendidikan yang relevan juga merupakan bagian dari upaya divisi ini. Program ini mencakup pelatihan teknis dan pengetahuan khusus yang dibutuhkan kader perempuan untuk memahami dan mempengaruhi kebijakan publik serta isu-isu sosial yang penting. Dengan pengetahuan ini, kader perempuan dapat berperan lebih aktif dalam perdebatan politik dan dalam merumuskan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Di samping pelatihan dan pendidikan formal, Divisi Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan juga menyediakan mentoring untuk kader perempuan yang baru bergabung atau yang sedang dalam proses pengembangan. Program mentoring ini menawarkan dukungan individual dan bimbingan langsung dari para pemimpin berpengalaman di partai. Melalui mentoring, kader perempuan dapat memperoleh wawasan yang berharga, mendapatkan umpan balik konstruktif, dan membangun jaringan profesional yang akan mendukung kemajuan mereka di bidang politik.

Kerja sama antara Divisi Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan dan divisi-divisi lainnya dalam Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan kader perempuan dalam peran politik mereka. Setiap divisi berkontribusi dengan

cara yang unik untuk mendukung kader perempuan, dan koordinasi yang efektif antara divisi-divisi ini memastikan bahwa kebutuhan kader perempuan diperhatikan secara menyeluruh. Melalui pendekatan sinergis ini, DPW PKS Aceh berupaya untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan kader perempuan, baik dalam kapasitas politik mereka maupun dalam kehidupan sosial mereka.³⁴

4.3 Pola Rekrutmen Kader Perempuan dalam DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh

4.3.1 Gender dalam DPW PKS Aceh

Dalam konteks politik Aceh, keterwakilan perempuan menjadi isu penting yang mendapat perhatian khusus, terutama bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai partai politik yang memiliki basis ideologis Islam, PKS memiliki pendekatan khas dalam mendorong partisipasi perempuan, terutama dalam hal pengambilan peran di ranah publik dan politik. Di DPW PKS Aceh, upaya ini tidak hanya sebatas memenuhi regulasi seperti kuota 30 persen keterwakilan perempuan, tetapi juga mencakup inisiatif strategis yang mendukung dan memfasilitasi pemberdayaan perempuan dalam politik. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, yang memiliki tanggung jawab penting dalam mempersiapkan dan mengarahkan kader perempuan ke posisi-posisi strategis.

PKS berusaha mendorong keterwakilan perempuan melalui program-program yang terencana dengan baik. Dalam struktur partai, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga berfungsi sebagai pusat pembinaan kader perempuan. Salah satu inisiatif penting yang dijalankan adalah pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, di mana perempuan tidak hanya diajarkan tentang teknik politik dan manajemen kampanye, tetapi juga dibekali dengan pemahaman spiritual dan etika yang kuat, sesuai dengan nilai-nilai partai. Dengan demikian, perempuan tidak hanya dilatih untuk terjun ke politik, tetapi juga untuk menjadi pemimpin yang

³⁴ Ramadhani, G. A. (2019). Pola rekrutmen politik kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung. *Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang.*

memiliki landasan moral dan spiritual yang kokoh, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Salah satu cara PKS mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam politik adalah dengan memberikan akses langsung bagi perempuan untuk berperan aktif dalam struktur partai, mulai dari tingkat ranting hingga pusat. Dalam hal ini, DPW PKS Aceh secara aktif mempromosikan kader perempuan ke posisi kepemimpinan, baik sebagai pengurus partai maupun sebagai calon legislatif. Partai ini telah mengadopsi kebijakan internal yang mendukung partisipasi perempuan melalui alokasi khusus untuk perempuan dalam struktur kepengurusan dan daftar calon legislatif. Langkah ini tidak hanya mengikuti aturan kuota, tetapi juga mencerminkan komitmen PKS untuk memastikan perempuan mendapatkan ruang dan kesempatan yang adil dalam proses politik.

Lebih jauh lagi, PKS Aceh memanfaatkan jaringan sosial yang luas untuk menjangkau dan merekrut kandidat perempuan. Jaringan sosial ini memainkan peran penting dalam mendukung upaya rekrutmen partai, karena jaringan tersebut sering kali berasal dari komunitas yang memiliki afiliasi dekat dengan partai, seperti komunitas pengajian, organisasi perempuan berbasis agama, hingga kelompok-kelompok sosial lainnya. Melalui jaringan ini, PKS dapat menjangkau perempuan yang memiliki potensi tetapi mungkin belum terlibat dalam politik formal. Jaringan ini memungkinkan identifikasi kandidat perempuan yang memiliki kapabilitas kepemimpinan dan minat dalam politik, sekaligus membuka pintu bagi perempuan yang mungkin merasa tidak memiliki akses atau dukungan untuk terjun ke dunia politik.

Jaringan sosial ini juga memungkinkan partai untuk terus berinteraksi dengan calon kader perempuan melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Misalnya, DPW PKS Aceh sering kali mengadakan kegiatan pengajian yang tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada pendidikan politik dan isu-isu kebijakan yang relevan bagi perempuan. Dalam forum-forum seperti ini, PKS Aceh dapat lebih mudah menarik perhatian perempuan yang berpotensi menjadi

pemimpin politik masa depan, sekaligus memberikan mereka dukungan moral dan sosial yang mereka butuhkan untuk menapaki dunia politik.

Dalam hal metode rekrutmen, DPW PKS Aceh menggunakan pendekatan yang aktif dan berjenjang. Program kaderisasi menjadi jantung dari upaya ini, di mana perempuan yang direkrut akan melalui serangkaian pelatihan politik yang dirancang untuk membangun kapasitas kepemimpinan mereka. Program ini bukan hanya sekadar memberi pelatihan teknis tentang politik dan kampanye, tetapi juga fokus pada pengembangan kepribadian dan spiritualitas, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh PKS. Hal ini penting karena partai percaya bahwa perempuan yang memiliki landasan spiritual yang kuat akan mampu menghadapi tantangan politik yang sering kali keras dan kompetitif.

Selain itu, DPW PKS Aceh juga menerapkan strategi rekrutmen yang lebih langsung, dengan mengundang perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, seperti seminar, workshop, dan diskusi publik. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai platform pendidikan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi perempuan yang memiliki minat dan bakat politik. Dengan cara ini, PKS dapat secara lebih langsung dan aktif menjangkau kandidat-kandidat perempuan potensial untuk diangkat ke posisi strategis, baik di partai maupun dalam pencalonan legislatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Nova Zahara, Selaku staf Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di DPW PKS Aceh.

"Di DPW PKS Aceh, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam politik. Kami tidak hanya sekadar memenuhi kuota 30 persen, tetapi kami ingin perempuan benar-benar terlibat aktif dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Melalui Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, kami memberikan pelatihan berjenjang yang mencakup pembekalan spiritual dan politik. Kami mengadakan berbagai kegiatan seperti pengajian dan diskusi publik yang memfasilitasi perempuan untuk memahami peran politik mereka.

Jaringan sosial, terutama yang berbasis komunitas keagamaan, memainkan peran penting dalam perekrutan kader perempuan. Kami melihat ini sebagai cara untuk membuka jalan bagi perempuan yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses atau keberanian untuk terjun ke dunia politik".³⁵

Berdasarkan pernyataan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW PKS Aceh, dapat disimpulkan bahwa DPW PKS Aceh memiliki pendekatan yang mendalam dan strategis dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Mereka menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya memenuhi kuota 30 persen, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses politik dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa PKS Aceh tidak sekadar mematuhi peraturan, melainkan berupaya untuk memberikan perempuan peran yang substansial dan berarti dalam struktur partai dan politik secara umum.

DPW PKS Aceh menyediakan pelatihan yang berjenjang dan holistik untuk kader perempuan, yang mencakup tidak hanya aspek teknis politik, tetapi juga pembekalan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa partai ingin perempuan yang terlibat dalam politik tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga landasan moral dan spiritual yang kuat, sesuai dengan nilai-nilai partai. Ini diharapkan dapat membentuk pemimpin perempuan yang tidak hanya kompeten dalam politik tetapi juga memiliki integritas yang kokoh.

Selanjutnya, PKS Aceh memanfaatkan jaringan sosial, terutama yang berbasis komunitas keagamaan, untuk merekrut kader perempuan. Jaringan ini memainkan peran krusial dalam menjangkau perempuan yang mungkin sebelumnya tidak memiliki akses atau keberanian untuk terjun ke dunia politik. Dengan mengadakan kegiatan seperti pengajian dan diskusi publik, PKS Aceh dapat memfasilitasi perempuan untuk memahami dan mengembangkan peran politik mereka. Ini menunjukkan bahwa partai tidak hanya berfokus pada

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nova Zahara, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. pada tanggal 11 agustus 2024.

rekrutmen, tetapi juga pada pembentukan dan pengembangan kapasitas perempuan yang terlibat dalam politik melalui interaksi sosial yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pernyataan ini menggambarkan upaya DPW PKS Aceh yang terencana dan komprehensif dalam mendukung keterwakilan perempuan, dengan pendekatan yang tidak hanya menekankan angka kuota tetapi juga kualitas partisipasi dan pengembangan kepemimpinan perempuan di ranah politik.

4.3.2 Ambisi Politik Perempuan DPW PKS

Dorongan utama yang mendorong perempuan di DPW PKS Aceh untuk terlibat dalam politik sering kali berakar pada kombinasi faktor pribadi dan komunitas. Banyak perempuan merasa terdorong oleh keinginan untuk membuat perbedaan nyata dalam masyarakat mereka. PKS memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan politik yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan ini menjadi motivasi besar. Perasaan tanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan sosial, didorong oleh keyakinan pribadi dan dorongan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan isu-isu sosial, sering kali memacu mereka untuk aktif.

Selain itu, dorongan juga datang dari dukungan dan inspirasi yang mereka terima dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga, teman, dan komunitas agama. PKS secara aktif menciptakan lingkungan yang mendukung ambisi politik perempuan dengan menyediakan platform untuk belajar dan berkembang, seperti pelatihan kepemimpinan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Keterlibatan dalam komunitas keagamaan, yang seringkali menjadi bagian integral dari jaringan sosial mereka, juga memberikan dorongan moral dan dukungan yang memperkuat keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam politik.

Saat mempertimbangkan pencalonan, perempuan di DPW PKS Aceh menghadapi berbagai pertimbangan strategis. Salah satu pertimbangan utama adalah bagaimana posisi politik yang mereka incar akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan pribadi dan sosial. Mereka

mengevaluasi seberapa besar pengaruh yang dapat mereka miliki dan bagaimana posisi tersebut dapat digunakan untuk memajukan agenda mereka, baik itu dalam hal kebijakan publik, program sosial, atau perubahan sosial.

Perempuan juga mempertimbangkan dukungan yang mereka terima dari partai, termasuk akses ke sumber daya, pelatihan, dan jaringan sosial yang dapat membantu mereka dalam pencalonan. Dukungan dari PKS, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan mendapatkan pembekalan yang diperlukan, merupakan faktor penting dalam keputusan mereka. Mereka juga mempertimbangkan tantangan yang mungkin dihadapi, seperti stigma sosial atau hambatan dalam struktur politik yang mungkin tidak selalu ramah terhadap perempuan. Evaluasi ini membantu mereka menilai kesiapan mereka dan strategi yang akan diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.

Sumber daya yang dimiliki kandidat perempuan dalam proses pencalonan di DPW PKS Aceh memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan mereka. Sumber daya ini mencakup dukungan, pelatihan, dan akses ke jaringan sosial yang relevan. PKS menyediakan berbagai bentuk dukungan, mulai dari pelatihan kepemimpinan hingga pembekalan tentang strategi kampanye dan manajemen politik. Dukungan ini penting untuk membangun kapasitas kandidat perempuan, mempersiapkan mereka menghadapi persaingan, dan meningkatkan peluang mereka dalam pencalonan.

Selain itu, jaringan sosial yang dimiliki oleh kandidat perempuan, termasuk afiliasi dengan komunitas keagamaan dan organisasi sosial, memberikan dukungan moral dan mobilisasi dukungan publik. Jaringan ini seringkali menjadi sumber daya yang membantu kandidat dalam mengidentifikasi dan menjangkau pemilih, serta menggalang dukungan untuk kampanye mereka. Keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas dan organisasi juga membantu mereka membangun reputasi dan kredibilitas yang diperlukan untuk pencalonan.

Dengan dorongan kuat untuk terlibat, pertimbangan strategis yang matang, dan sumber daya yang memadai, perempuan di DPW PKS Aceh menunjukkan

ambisi politik yang serius dan berpotensi mempengaruhi dinamika politik di tingkat lokal dan lebih luas. Kombinasi dari faktor-faktor ini tidak hanya memotivasi mereka untuk berpartisipasi tetapi juga membekali mereka dengan alat yang diperlukan untuk sukses dalam arena politik. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Tati Meutia Asmara, politisi perempuan yang telah lama bergabung dengan PKS sekaligus sebagai Ketua DPRK Banda Aceh

"Saya merasa dorongan utama saya untuk terjun ke dunia politik adalah keinginan untuk berkontribusi pada perubahan nyata dalam masyarakat. Sebagai seorang perempuan yang aktif di PKS, saya melihat peluang besar untuk memberikan dampak positif di lingkungan saya, terutama dalam memperjuangkan hak-hak sosial yang sering terabaikan. PKS membuka ruang bagi saya untuk tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga membangun kapasitas saya dalam memimpin dan memajukan agenda sosial yang penting. Dalam proses pencalonan, saya selalu mempertimbangkan bagaimana posisi yang saya incar bisa membantu saya mencapai tujuan-tujuan tersebut. Saya tidak sekadar melihat dari perspektif pribadi, tetapi bagaimana saya bisa menggunakan posisi ini untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada isu-isu sosial yang saya pedulikan. Dukungan dari partai dalam bentuk pelatihan dan pembekalan sangat membantu saya untuk merasa lebih siap dan percaya diri menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Selain itu, dukungan yang saya terima dari berbagai jaringan sosial, terutama dari rekan-rekan yang sevisi, juga menjadi kekuatan penting dalam pencalonan saya. Jaringan ini tidak hanya membantu dalam mobilisasi dukungan, tetapi juga memberikan saya keyakinan bahwa saya bisa membawa perubahan melalui posisi politik yang saya incar. Semua faktor ini, baik dukungan partai maupun dukungan dari jaringan sosial, sangat menentukan kesuksesan saya dalam menjalani proses pencalonan dan mewujudkan ambisi politik saya".³⁶

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Tati Meutia Asmara, politisi perempuan, pada tanggal 1 agustus 2024.

Berdasarkan Pernyataan ini menegaskan bagaimana ambisi politik perempuan di DPW PKS Aceh dipengaruhi oleh dorongan internal yang kuat untuk berkontribusi pada perubahan sosial. Dorongan tersebut berasal dari kesadaran diri akan tanggung jawab sosial dan keinginan untuk membuat perbedaan nyata di masyarakat. PKS, dalam hal ini, menyediakan ruang yang mendukung ambisi perempuan dengan memberikan akses ke peluang kepemimpinan dan partisipasi aktif dalam politik.

Dalam proses pencalonan, perempuan di PKS tidak hanya mempertimbangkan posisi politik sebagai sarana untuk mencapai tujuan pribadi, tetapi juga untuk memajukan agenda sosial yang lebih luas. Mereka mengevaluasi sejauh mana posisi tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari partai dalam bentuk pelatihan, pembekalan politik, dan akses ke sumber daya menjadi elemen penting yang memperkuat kesiapan dan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan politik.

Sumber daya lain yang penting adalah dukungan dari jaringan sosial. Jaringan ini tidak hanya menyediakan dukungan moral, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun reputasi politik, menjangkau pemilih, dan menggalang dukungan publik. Perempuan di DPW PKS Aceh menunjukkan bahwa dengan dorongan internal yang kuat, perencanaan strategis yang matang, dan dukungan dari berbagai sumber daya, mereka memiliki potensi besar untuk sukses dan berperan aktif dalam politik, memengaruhi perubahan di masyarakat dengan pendekatan yang terstruktur dan fokus pada isu-isu sosial.

4.3.3 Perekrutan Perempuan dalam DPW PKS

Proses perekrutan perempuan dalam DPW PKS Aceh melibatkan beberapa tahapan yang berkaitan dengan mekanisme partai, pengaruh jaringan sosial, strategi kampanye, serta tingkat inklusivitas dalam sistem rekrutmennya. Semua elemen ini membentuk sebuah proses yang kompleks dan dinamis, di mana

perempuan didorong untuk mengambil peran aktif dalam politik melalui jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh partai.

Di DPW PKS Aceh, mekanisme untuk pencalonan kandidat perempuan dirancang secara sistematis untuk memastikan seleksi yang adil dan efektif. Proses ini dimulai dengan identifikasi kandidat potensial yang dilakukan berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas partai dan kontribusi mereka terhadap berbagai program sosial dan politik. Para kader perempuan yang menunjukkan dedikasi, keterampilan kepemimpinan, dan komitmen terhadap visi partai menjadi kandidat yang diperhitungkan untuk posisi-posisi strategis.

Setelah kandidat diidentifikasi, mereka memasuki tahap pelatihan intensif yang dirancang untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan mereka. Pelatihan ini meliputi berbagai aspek seperti strategi kampanye, komunikasi publik, serta pemahaman mendalam tentang kebijakan politik dan sosial. PKS menyediakan modul pelatihan yang komprehensif untuk membekali kandidat dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam arena politik, termasuk manajemen tim, pengelolaan kampanye, serta penanganan isu-isu yang mungkin muncul selama masa kampanye.

Selain pelatihan, kandidat perempuan juga mendapatkan bimbingan dari mentor dan pimpinan partai. Proses ini membantu mereka mempersiapkan diri untuk tantangan politik dan membangun strategi yang efektif untuk kampanye mereka. Dukungan dari pimpinan partai dan pengurus daerah sangat penting dalam menentukan kesiapan dan kekuatan kandidat, serta memberikan mereka akses ke sumber daya dan jaringan yang diperlukan.

Jaringan sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses perekrutan perempuan di DPW PKS Aceh. Jaringan sosial ini mencakup hubungan dengan keluarga, teman, serta komunitas sosial dan profesional yang dapat memberikan dukungan moral dan praktis kepada kandidat perempuan. Di PKS, jaringan sosial tidak hanya berfungsi sebagai sumber dukungan tetapi juga sebagai platform untuk mobilisasi dukungan publik.

Keterlibatan perempuan dalam komunitas sosial seringkali menjadi langkah awal mereka dalam memasuki dunia politik. Jaringan ini membantu kandidat dalam membangun basis dukungan yang kuat dan memperluas jangkauan mereka di kalangan pemilih. Keluarga dan teman dekat memberikan dorongan moral, sedangkan afiliasi dengan organisasi sosial dan komunitas lokal menyediakan dukungan praktis dan strategis. PKS memanfaatkan kekuatan jaringan ini dengan menjalin hubungan erat dengan berbagai kelompok dalam masyarakat dan berkolaborasi dengan organisasi sosial untuk memperkuat posisi kandidat perempuan.

PKS juga memanfaatkan jaringan sosial ini dalam strategi kampanye mereka. Dukungan dari komunitas dan organisasi sosial membantu kandidat dalam membangun reputasi dan kredibilitas mereka, serta memobilisasi dukungan publik. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam jaringan sosial, PKS dapat meningkatkan visibilitas kandidat perempuan dan memperkuat posisi mereka dalam pemilihan.

Strategi kampanye yang diterapkan oleh DPW PKS Aceh untuk kandidat perempuan melibatkan berbagai metode komunikasi untuk menjangkau dan mempengaruhi pemilih. Kampanye dilakukan melalui media sosial, platform digital, serta kegiatan tatap muka di masyarakat. PKS menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye yang menekankan kontribusi positif yang dapat diberikan oleh kandidat perempuan dalam politik. Pesan ini biasanya dirancang untuk menunjukkan kemampuan kandidat dalam memimpin dan mempengaruhi kebijakan publik.

Di samping itu, PKS juga menerapkan kampanye berbasis komunitas yang melibatkan pertemuan langsung dengan pemilih. Kegiatan seperti diskusi publik, pertemuan komunitas, dan forum-forum lokal memberikan kesempatan bagi kandidat perempuan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, menjelaskan visi dan program mereka, serta membangun hubungan yang lebih personal dengan

pemilih. Kegiatan ini tidak hanya membantu dalam membangun dukungan tetapi juga dalam meningkatkan visibilitas kandidat di mata publik.

Kampanye PKS seringkali dirancang untuk menyoroti prestasi dan kontribusi kandidat perempuan, serta untuk mengatasi isu-isu yang menjadi perhatian utama masyarakat. Dengan strategi kampanye yang terintegrasi dan fokus pada komunikasi yang efektif, PKS berusaha untuk menciptakan dampak positif yang dapat meningkatkan peluang kandidat perempuan dalam pemilihan.

Secara keseluruhan, proses rekrutmen di DPW PKS Aceh mencerminkan pendekatan inklusif yang ditujukan untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Ini tercermin dari upaya partai dalam menyediakan pelatihan intensif yang mempersiapkan kandidat perempuan dengan keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam arena politik. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti strategi kampanye, komunikasi publik, dan pemahaman mendalam tentang kebijakan politik, yang semuanya dirancang untuk memberikan bekal yang kuat bagi kandidat perempuan.

Dukungan yang diberikan oleh mentor dan pimpinan partai juga merupakan bagian integral dari proses ini. Para kandidat perempuan tidak hanya mendapatkan bimbingan langsung dari individu yang berpengalaman, tetapi juga akses ke sumber daya dan jaringan yang diperlukan untuk memperkuat posisi mereka. Dukungan ini penting untuk membantu kandidat menghadapi tantangan politik dan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam merencanakan dan melaksanakan kampanye.

Selain itu, strategi yang diterapkan oleh PKS Aceh menunjukkan upaya untuk meningkatkan visibilitas dan dukungan bagi kandidat perempuan. Partai memanfaatkan berbagai metode komunikasi, seperti media sosial dan platform digital, untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye yang menyoroti kontribusi kandidat perempuan. Kampanye berbasis komunitas, yang melibatkan pertemuan langsung dengan pemilih, juga memberikan kesempatan bagi kandidat untuk

membangun hubungan yang lebih personal dengan masyarakat dan memperluas jangkauan mereka.

Dengan cara ini, PKS Aceh tidak hanya memenuhi persyaratan formal tentang keterwakilan perempuan tetapi juga menciptakan lingkungan yang aktif mendukung dan memberdayakan kandidat perempuan. Ini menunjukkan komitmen partai untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam politik dan sukses dalam karir politik mereka. Bapak Ismunandar, selaku staf DPW PKS sekaligus Bidang Kaderisasi menjelaskan bahwa

"Kami di DPW PKS Aceh selalu berusaha untuk memastikan bahwa rekrutmen kader perempuan dilakukan dengan cara yang inklusif dan transparan. Setiap tahapan proses rekrutmen mulai dari identifikasi kandidat, pelatihan, hingga kampanye, dirancang untuk memberi perempuan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam politik. Kami mengidentifikasi kandidat berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam program sosial dan politik, lalu memberikan pelatihan intensif yang mencakup berbagai aspek penting seperti strategi kampanye dan komunikasi publik. Selain itu, kami juga menyediakan dukungan bimbingan dari mentor dan pimpinan partai untuk memastikan kesiapan mereka. Kami juga sangat mengandalkan dukungan jaringan sosial dalam memperkuat posisi kandidat perempuan, baik dari keluarga, teman, maupun komunitas sosial yang lebih luas. Ini semua dilakukan untuk memperluas basis dukungan dan memastikan bahwa kandidat perempuan memiliki peluang terbaik untuk berhasil dalam arena politik".³⁷

Berdasarkan Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPW PKS Aceh menerapkan proses rekrutmen kader perempuan dengan pendekatan yang sangat inklusif dan transparan. Proses rekrutmen dimulai dengan identifikasi kandidat yang didasarkan pada keterlibatan aktif mereka dalam program sosial dan politik,

³⁷ Hasil wawancara Bapak Ismunandar, staf DPW PKS Bidang Kaderisasi, pada tanggal 28 juli 2024.

memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki rekam jejak dan komitmen yang jelas.

Pelatihan intensif yang diberikan mencakup aspek-aspek penting seperti strategi kampanye dan komunikasi publik, dirancang untuk membekali kandidat perempuan dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam politik. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan dan mempersiapkan kandidat untuk tantangan yang akan dihadapi selama kampanye.

Dukungan dari mentor dan pimpinan partai merupakan bagian penting dari proses ini, memberikan bimbingan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan politik dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kampanye mereka.

Selain itu, jaringan sosial, termasuk dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas sosial, memainkan peran signifikan dalam memperkuat posisi kandidat perempuan. Jaringan ini membantu membangun basis dukungan yang solid dan memperluas jangkauan kandidat di kalangan pemilih, baik melalui dukungan moral maupun praktis.

Strategi kampanye yang melibatkan penggunaan media sosial dan kegiatan berbasis komunitas dirancang untuk meningkatkan visibilitas dan dukungan publik bagi kandidat perempuan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen partai untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan kandidat perempuan, memberikan mereka peluang terbaik untuk sukses di arena politik.

4.4 Peluang dan Tantangan Proses Rekrutmen Kader Perempuan dalam DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh

4.4.1 Peluang Proses Rekrutmen Kader Perempuan dalam DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh

Peluang dalam Proses Rekrutmen Kader Perempuan di DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Aceh mencakup beberapa aspek yang

memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik. Berikut adalah beberapa peluang tersebut:

1. Sistem Pemilu

Sistem pemilu di Indonesia memberikan peluang besar bagi perempuan untuk direkrut sebagai kader, termasuk di DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Aceh. Sistem ini membuka banyak kesempatan bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik, dan dengan dukungan yang tepat, keterlibatan perempuan dapat dioptimalkan secara signifikan.

PKS Aceh, seperti partai politik lainnya di Indonesia, diharuskan mematuhi kebijakan kuota gender yang menetapkan bahwa minimal 30% perempuan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik dan memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan kuota gender ini memaksa partai politik, termasuk PKS Aceh, untuk aktif mencari dan merekrut perempuan yang bersedia dan mampu. Ini berarti bahwa partai harus melakukan upaya lebih untuk mendekati perempuan, memberikan pelatihan dan dukungan, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan kampanye. Bapak Ismunandar, selaku staf DPW PKS sekaligus Bidang Kaderisasi menjelaskan bahwa,

“Sistem pemilu saat ini sudah cukup memberikan peluang bagi keterlibatan perempuan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang mendorong inklusivitas, salah satunya adalah kuota gender. Kebijakan kuota gender ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan adanya kuota ini, partai politik diwajibkan untuk menyertakan sejumlah minimal calon perempuan dalam daftar mereka, yang secara langsung meningkatkan representasi perempuan dalam proses pencalonan dan pemilihan. Kuota ini tidak hanya membuka pintu bagi

lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik, tetapi juga membantu mengatasi hambatan sistemik yang sering kali menghalangi perempuan untuk maju dalam karir politik”.³⁸

Berdasarkan Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kuota gender berperan sebagai salah satu mekanisme utama yang memastikan perempuan mendapatkan kesempatan lebih besar dalam proses politik, terutama di tengah hambatan sistemik yang seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Kuota gender, yang mewajibkan partai politik untuk mencalonkan minimal sejumlah perempuan, memiliki dampak yang signifikan dalam membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik. Dengan adanya kebijakan ini, partai politik seperti PKS tidak hanya memperluas representasi perempuan, tetapi juga menggeser dinamika politik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Secara praktis, kuota ini membantu mengurangi hambatan struktural seperti bias gender dalam proses seleksi calon, kurangnya akses perempuan terhadap sumber daya politik, dan terbatasnya ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan ambisi politik mereka.

Selain itu, kebijakan kuota gender memperkuat komitmen partai politik dalam mewujudkan representasi yang lebih inklusif. Dengan lebih banyak perempuan yang terlibat dalam proses politik, berbagai perspektif gender dapat lebih terakomodasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini juga membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk memimpin isu-isu yang relevan dengan hak-hak dan kepentingan perempuan, serta mendorong partisipasi perempuan lainnya.

Namun, analisis ini juga menyoroti bahwa keberhasilan kuota gender tidak hanya bergantung pada implementasi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana partai politik mendukung kandidat perempuan setelah mereka dicalonkan. Meskipun

³⁸ Hasil wawancara Bapak Ismunandar, staf DPW PKS Bidang Kaderisasi, pada tanggal 28 juli 2024.

kuota gender membuka pintu bagi lebih banyak perempuan untuk masuk dalam daftar calon, dukungan yang memadai seperti pelatihan, bimbingan, dan akses terhadap sumber daya politik yang setara tetap diperlukan agar perempuan bisa berhasil dan berkelanjutan dalam politik.

Dalam konteks DPW PKS Aceh, kebijakan kuota gender memberikan dorongan signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Namun, upaya tersebut harus dilengkapi dengan strategi-strategi yang lebih luas untuk memastikan perempuan dapat benar-benar sukses dan menghadapi tantangan politik dengan lebih percaya diri dan kompeten.

2. Organisasi Partai

Perkembangan organisasi internal dan aturan rekrutmen dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan peluang signifikan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. PKS secara konsisten menerapkan kebijakan kuota gender yang ketat, memastikan bahwa minimal 30% dari calon legislatif adalah perempuan. Kebijakan ini menjadi peluang besar dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik, terutama di DPW PKS Aceh.

Selain kebijakan kuota, PKS juga telah meluncurkan berbagai program pelatihan kepemimpinan dan mentoring yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kader perempuan. Program-program ini memberikan perempuan alat dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia politik, mulai dari strategi kampanye hingga keterampilan berbicara di depan umum. Dengan adanya pelatihan mendalam ini, perempuan di PKS memiliki akses yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan mereka dan menghadapi tantangan dalam dunia politik yang sering didominasi oleh laki-laki.

PKS juga menyediakan dukungan mentoring terstruktur, yang memungkinkan kader perempuan untuk mendapatkan bimbingan langsung dari anggota partai yang lebih berpengalaman. Ini membuka peluang besar bagi perempuan untuk berkembang dalam peran politik mereka dan mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi selama proses politik. Dukungan ini tidak

hanya menciptakan lingkungan yang inklusif tetapi juga membantu perempuan membangun jejaring yang kuat dan mendukung untuk keberhasilan politik mereka.

Selain itu, PKS telah melakukan reformasi internal yang memperkuat peluang keterlibatan perempuan. Dengan menciptakan sistem yang lebih transparan dan inklusif, keputusan politik tidak lagi didominasi oleh sekelompok elit laki-laki. Lingkungan ini menciptakan peluang bagi perempuan untuk berkontribusi secara signifikan dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus mengurangi pengaruh sistem patronase yang sering kali menghambat partisipasi perempuan. Reformasi ini memastikan bahwa keterlibatan perempuan dalam partai dianggap penting dan didukung secara penuh.

Begitu juga dengan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) di DPW PKS Aceh yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan dan keterlibatan perempuan dalam politik. BPKK dengan divisi-divisi di dalamnya bertanggung jawab atas berbagai program yang fokus pada peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik dan ketahanan keluarga. Divisi ini menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan kegiatan lain yang bertujuan memperkuat posisi perempuan di lingkungan partai dan masyarakat.

BPKK juga berfungsi sebagai platform bagi perempuan untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan strategi dalam menghadapi tantangan politik. Program-program dari BPKK mencakup pelatihan dalam bidang public speaking, negosiasi politik, dan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye yang efektif. Dengan dukungan dari divisi ini, perempuan di DPW PKS Aceh memiliki peluang yang lebih besar untuk berperan aktif dalam politik dan mengembangkan potensi kepemimpinan mereka.

Reformasi internal yang dilakukan oleh PKS dan peran strategis BPKK memberikan peluang besar bagi perempuan di DPW PKS Aceh untuk terlibat dalam politik. Dengan adanya pelatihan dan dukungan yang diberikan melalui BPKK, perempuan di partai ini memiliki akses yang lebih luas untuk terlibat

dalam politik dan membawa perubahan nyata dalam struktur politik yang lebih inklusif dan representatif. Dalam sebuah wawancara dengan Bapak Ahmad Abdullah Rahil Bin Irwansyah, selaku caleg laki-laki PKS Aceh menyatakan,

"Saya melihat PKS telah melakukan banyak hal untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Kebijakan kuota gender dan program-program pelatihan yang ada sangat membantu kader perempuan untuk lebih siap dan percaya diri berkompetisi dalam dunia politik. Tidak hanya itu, keberadaan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) juga sangat penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk bisa berhasil".³⁹

Berdasarkan Pernyataan tersebut menggarisbawahi bagaimana PKS di Aceh memberikan peluang besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Kebijakan kuota gender yang diterapkan oleh PKS, yang mewajibkan setidaknya 30% dari calon legislatif berasal dari kalangan perempuan, merupakan bentuk komitmen nyata partai untuk meningkatkan representasi perempuan. Dalam konteks ini, kuota gender berfungsi sebagai alat yang sangat efektif untuk menciptakan peluang yang lebih besar bagi perempuan, memastikan bahwa mereka tidak hanya terlibat secara simbolis tetapi juga aktif dalam pengambilan keputusan politik.

Selain itu, pelatihan yang dirancang khusus bagi kader perempuan memberikan perempuan keunggulan kompetitif dalam menghadapi proses politik yang penuh tantangan. Program-program ini mencakup pelatihan tentang strategi kampanye, keterampilan berbicara di depan umum, dan taktik bernegosiasi, yang semuanya sangat penting dalam arena politik. Kader perempuan dilatih untuk tidak hanya memahami bagaimana memenangkan pemilu tetapi juga bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dalam mempengaruhi kebijakan.

³⁹ Hasil wawancara Bapak Ahmad Abdullah Rahil Bin Irwansyah, caleg laki-laki PKS Aceh, pada tanggal 3 Agustus 2024.

Peran Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) juga sangat signifikan. Sebagai salah satu bidang utama di DPW PKS Aceh, BPKK menyediakan dukungan yang tidak hanya terbatas pada pelatihan teknis, tetapi juga mencakup bimbingan emosional dan moral, sesuatu yang sangat penting dalam dunia politik yang sering kali keras dan penuh tekanan. Dukungan ini menciptakan peluang bagi perempuan untuk mendapatkan mentor yang lebih berpengalaman dan membangun jejaring politik yang kuat, membantu mereka mengatasi berbagai hambatan yang sering dihadapi perempuan di arena politik yang didominasi laki-laki.

Peluang lain yang tercipta adalah pengurangan sistem patronase dan pembukaan struktur partai yang lebih inklusif. Hal ini memberikan perempuan akses yang lebih luas untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di internal partai. Caleg laki-laki yang menyadari pentingnya reformasi ini juga dapat berperan sebagai sekutu dalam mempromosikan keterlibatan perempuan, menciptakan kolaborasi yang lebih kuat antara kader laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya kebijakan dan program ini, PKS berhasil menciptakan lingkungan yang sangat kondusif bagi perempuan untuk terlibat dan berkembang di dunia politik. Caleg laki-laki seperti Faisal melihat bahwa keterlibatan perempuan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas kontribusi yang mereka bawa dalam partai dan pemerintahan. Hasilnya, perempuan di DPW PKS Aceh memiliki peluang besar untuk memimpin, berinovasi, dan membawa perubahan yang lebih inklusif dalam politik lokal maupun nasional. Ini adalah indikasi kuat bahwa PKS, melalui upaya-upaya strategis dan terukur, berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan representasi dan peran perempuan secara signifikan dalam struktur politik Aceh.

4.4.2 Tantangan Proses Rekrutmen Kader Perempuan dalam DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh

Tantangan proses rekrutmen kader perempuan merujuk pada berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh partai politik atau organisasi dalam

upaya untuk merekrut, mempromosikan, dan mempertahankan perempuan. Berikut beberapa aspek yang menghambat keterlibatan perempuan dalam politik.

1. Konteks Budaya

Konteks budaya lokal di Aceh memainkan peran penting dalam mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik. Beberapa norma budaya dapat menjadi hambatan signifikan bagi perempuan yang ingin bergabung dengan partai politik dan terlibat dalam proses politik. Misalnya, pandangan tradisional tentang peran gender yang menempatkan perempuan terutama dalam lingkup domestik dapat membatasi ruang gerak dan peluang mereka untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Masyarakat Aceh yang memiliki nilai-nilai agama yang kuat juga cenderung memiliki pandangan konservatif terhadap peran perempuan di ranah publik. Hal ini sering kali menyebabkan perempuan merasa kurang didukung oleh keluarga dan komunitas mereka untuk terjun ke dunia politik.

Selain itu, tekanan sosial untuk mematuhi norma-norma budaya tersebut dapat membuat perempuan ragu atau bahkan takut untuk menonjolkan diri dalam politik. Norma yang menuntut perempuan untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab rumah tangga dan karier politik juga dapat menjadi penghalang signifikan. Ibu Tati Meutia Asmara, selaku politisi perempuan yang sangat paham terkait dengan konteks budaya, menyatakan bahwa,

"Di Aceh, ada norma-norma budaya yang seringkali membatasi peran perempuan dalam politik, dan ini menjadi tantangan besar bagi kami. Norma-norma tersebut mencakup pandangan bahwa perempuan seharusnya fokus pada urusan domestik dan keluarga, sementara urusan politik dianggap sebagai domain laki-laki. Akibatnya, perempuan yang mencoba untuk terjun ke dunia politik sering kali dihadapkan pada stigma sosial dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk dari keluarga mereka sendiri. Banyak dari kami harus berjuang keras untuk membuktikan bahwa kami mampu menjalankan peran publik tanpa

mengabaikan tanggung jawab keluarga, dan sering kali, usaha kami ini tidak diakui atau dihargai".⁴⁰

Berdasarkan Pernyataan tersebut ini menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi perempuan di Aceh dalam dunia politik, yang berkaitan erat dengan norma budaya, pandangan gender tradisional, dan ekspektasi sosial. Tantangan ini berakar pada pandangan yang telah lama mengakar di masyarakat Aceh, di mana peran perempuan lebih banyak diidentifikasi dengan ranah domestik, seperti mengurus keluarga dan rumah tangga, sementara politik dianggap sebagai domain laki-laki. Norma-norma ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan secara kultural, tetapi juga menciptakan hambatan struktural yang menghalangi mereka untuk terlibat secara aktif dalam dunia politik.

Perempuan yang mencoba untuk terlibat dalam politik sering kali menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, mereka harus membuktikan bahwa keterlibatan mereka dalam politik tidak akan mengganggu peran tradisional mereka dalam keluarga. Ini adalah beban yang tidak dihadapi oleh politisi laki-laki, yang tidak diharuskan menyeimbangkan tuntutan peran publik dengan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya standar ganda dalam masyarakat, di mana perempuan harus membuktikan kelayakan mereka di dua bidang sekaligus: politik dan domestik.

Stigma sosial yang kuat juga menjadi penghalang bagi perempuan yang ingin terjun ke politik. Perempuan sering kali dipandang sebagai "tidak pantas" atau "kurang sesuai" untuk terlibat dalam dunia politik, yang dianggap sebagai wilayah laki-laki. Masyarakat cenderung skeptis terhadap kemampuan perempuan untuk menjalankan tanggung jawab publik, terutama ketika mereka juga harus menjalankan tugas sebagai ibu atau istri. Hal ini mengakibatkan tekanan tambahan bagi perempuan, yang harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa mereka mampu menjalani peran ganda ini.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Tati Meutia Asmara, politisi perempuan, pada tanggal 1 agustus 2024.

Lebih dari itu, stigma ini dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan diri perempuan dalam politik. Mereka sering merasa tidak didukung oleh keluarga dan lingkungan mereka, yang lebih menekankan pentingnya peran domestik daripada karier politik. Dukungan dari keluarga sering kali menjadi kunci bagi perempuan untuk dapat terjun ke dunia politik. Tanpa dukungan ini, banyak perempuan yang merasa ragu untuk melangkah, bahkan ketika mereka memiliki potensi besar. Ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada konteks sosial yang lebih luas.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari keluarga, masyarakat, dan institusi politik untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Keluarga perlu mengubah cara pandang mereka terhadap peran perempuan dalam politik, memberikan dukungan penuh bagi perempuan yang ingin berpartisipasi aktif. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah ancaman bagi nilai-nilai keluarga, melainkan bentuk partisipasi yang esensial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil.

2. Kelompok Kandidat Perempuan

Di DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, tantangan besar dalam merekrut kader perempuan terletak pada kekurangan jumlah perempuan yang bersedia dan merasa cukup percaya diri untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Konteks Aceh yang masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal yang mendalam turut memperburuk situasi ini. Dalam masyarakat Aceh, yang sering kali memegang teguh nilai-nilai tradisional dan konservatif, peran perempuan seringkali terbatas pada urusan domestik. Pandangan ini tidak hanya membatasi kesempatan perempuan untuk terlibat dalam politik, tetapi juga menghambat mereka dalam mengembangkan keterampilan dan pengalaman politik yang diperlukan.

Norma-norma patriarkal yang kuat di Aceh secara sistematis menempatkan perempuan di luar ranah pengambilan keputusan politik dan publik.

Hal ini mengakibatkan perempuan sering kali tidak memiliki pengalaman politik yang memadai karena mereka lebih fokus pada tanggung jawab rumah tangga dan keluarga. Selain itu, perempuan di Aceh juga harus menghadapi ekspektasi sosial yang menuntut mereka untuk memenuhi peran tradisional sebagai ibu dan istri, sering kali menjadikan karier politik sebagai hal yang sekunder atau bahkan tabu. Tekanan sosial ini membuat perempuan merasa tertekan dan kurang memiliki dukungan dari keluarga serta masyarakat untuk mengejar aspirasi politik mereka.

Kekurangan kepercayaan diri di kalangan perempuan yang potensial untuk terjun ke dunia politik juga merupakan masalah signifikan. Banyak perempuan merasa bahwa mereka tidak memenuhi standar atau tidak memiliki pengalaman yang cukup, meskipun mereka mungkin memiliki potensi yang besar. Rasa kurang percaya diri ini diperparah oleh stigma sosial yang sering meremehkan kemampuan perempuan dalam politik dan lebih memprioritaskan peran laki-laki dalam ranah tersebut. Akibatnya, banyak perempuan enggan untuk mencalonkan diri atau terlibat dalam politik karena mereka merasa bahwa usaha mereka akan kurang dihargai atau bahkan ditolak oleh masyarakat. Dalam sebuah wawancara dengan Bapak Fauzi, selaku ketua DPD Aceh barat, mengatakan,

"Di sini, kita sering kali menghadapi tantangan besar dalam merekrut perempuan untuk maju sebagai kandidat. Banyak dari mereka merasa tidak cukup percaya diri atau tidak memiliki pengalaman yang memadai. Mereka merasa tertekan oleh harapan masyarakat yang masih menganggap peran perempuan sebagai ibu dan istri lebih penting daripada peran politik. Bahkan jika mereka memiliki potensi yang besar, stigma sosial dan kurangnya dukungan membuat mereka enggan untuk terjun ke dunia politik. Kami mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan pelatihan dan bimbingan, tetapi hasilnya belum optimal".⁴¹

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi, ketua DPD Aceh barat, pada tanggal 30 juli 2024.

Berdasarkan pernyataan ini menyoroti beberapa tantangan signifikan yang dihadapi oleh DPW PKS Aceh dalam merekrut kader perempuan. Pertama, kurangnya kepercayaan diri dan pengalaman yang memadai menjadi hambatan utama. Banyak perempuan merasa tidak cukup siap atau tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk terjun ke dunia politik, meskipun mereka mungkin memiliki potensi yang besar. Kekurangan pengalaman ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas politik sebelumnya, yang pada gilirannya membatasi kemampuan mereka untuk maju sebagai kandidat.

Selain itu, norma-norma sosial dan ekspektasi tradisional di Aceh turut memperburuk masalah ini. Masyarakat Aceh yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarkal cenderung menempatkan perempuan dalam peran domestik yang terbatas pada urusan rumah tangga dan keluarga. Ekspektasi sosial ini menciptakan tekanan tambahan bagi perempuan, sehingga mereka merasa tertekan dan kurang didukung untuk mengejar karier politik. Pandangan ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah publik tetapi juga menghambat mereka dalam mengembangkan keterampilan dan pengalaman politik yang diperlukan untuk terlibat secara aktif dalam politik.

Stigma sosial yang meremehkan peran perempuan dalam politik juga menjadi masalah besar. Banyak perempuan merasa bahwa usaha mereka untuk terjun ke politik akan menghadapi penolakan atau kurang dihargai oleh masyarakat, yang menghambat motivasi mereka untuk mencalonkan diri. Kekurangan dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat turut memperparah situasi ini, menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi perempuan untuk mengejar aspirasi politik mereka.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini mencerminkan hambatan struktural dan sosial yang mendalam yang harus dihadapi oleh perempuan di Aceh dalam upaya mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Problematika ini tidak

hanya berkisar pada kekurangan individu tetapi juga pada konteks sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam ranah publik.

3. Berkampanye

Di DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, pendanaan kampanye merupakan tantangan besar yang khusus dihadapi oleh kandidat perempuan. Kampanye pemilihan umum memerlukan berbagai sumber daya, dengan dana sebagai salah satu komponen paling krusial. Bagi kandidat perempuan, tantangan ini sering kali menjadi lebih signifikan, terutama di konteks Indonesia di mana akses perempuan terhadap kekuasaan dan sumber daya sering kali lebih terbatas dibandingkan laki-laki.

Hambatan psikologis menjadi salah satu tantangan utama. Sosialisasi gender yang mengakar dalam masyarakat patriarki sering kali menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan lebih berpengalaman dalam mengelola keuangan. Sebaliknya, perempuan yang sering kali lebih terfokus pada ranah domestik mungkin merasa kurang percaya diri dalam mengelola aspek finansial kampanye. Mereka tidak terbiasa dengan proses pengumpulan dana untuk kepentingan politik dan merasa tidak memiliki keahlian atau pengalaman yang memadai dalam hal ini.

Selain itu, jaringan yang didominasi laki-laki juga menjadi hambatan penting. Laki-laki umumnya memiliki jaringan bisnis dan profesional yang lebih luas, yang menyediakan akses ke sumber daya finansial dan keahlian yang diperlukan untuk kampanye. Struktur jaringan yang sering kali mengabaikan perempuan menghambat akses mereka ke dukungan yang penting. Perempuan yang memiliki akses ke sumber daya biasanya adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan politisi terkenal, tetapi ini bukanlah representasi dari mayoritas kandidat perempuan.

Masalah pendanaan awal juga merupakan hambatan signifikan. Penghasilan perempuan yang umumnya lebih rendah dibandingkan laki-laki membuat mereka kurang mampu mengeluarkan dana pribadi untuk keperluan

kampanye. Ketidakmampuan untuk mengakses dana pribadi ini membatasi peluang perempuan untuk bersaing secara efektif dalam pemilu. Kelangkaan sumber daya di negara berkembang seperti Indonesia memperburuk masalah ini. Biaya pencalonan, meskipun kecil, dapat mengecualikan perempuan dari proses pemilu jika mereka tidak memiliki akses ke dana yang diperlukan. Seperti yang diungkapkan Ibu Dian Huriana, selaku staf DPW PKS bidang pemenangan pemilu dan pilkada sekaligus caleg perempuan mengatakan bahwa,

"Berkampanye sebagai perempuan memiliki tantangan tersendiri, seperti menghadapi hambatan psikologis yang membuat kami merasa kurang percaya diri, jaringan yang didominasi laki-laki yang membatasi akses kami ke sumber daya penting, serta kesulitan dalam mengumpulkan uang awal dan nominasi karena penghasilan yang lebih rendah dan kurangnya akses ke pendanaan publik. Semua ini sangat mempengaruhi efektivitas kampanye dan partisipasi kami dalam politik".⁴²

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan-tantangan yang memang secara langsung mempengaruhi efektivitas kampanye perempuan. Hambatan psikologis yang menyebabkan kurangnya kepercayaan diri, ditambah dengan jaringan yang cenderung menguntungkan laki-laki dan kesulitan dalam mengumpulkan dana awal, semuanya berkontribusi pada kesulitan perempuan dalam menjalankan kampanye politik yang efektif. Kelangkaan sumber daya juga menjadi masalah yang signifikan, membatasi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara penuh.

Dengan memahami tantangan-tantangan ini, dapat dilihat bahwa dukungan yang tepat dan strategi yang efektif sangat diperlukan untuk membantu perempuan mengatasi hambatan-hambatan ini. Tanpa dukungan yang memadai, tantangan ini akan terus menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara maksimal dalam politik, menghambat potensi mereka untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam perubahan sosial dan politik.

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Dian Huriana, staf DPW PKS bidang pemenangan pemilu dan pilkada, pada tanggal 2 agustus 2024.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan temuan yang sudah peneliti kumpulkan, maka diperoleh kesimpulan yang menunjukkan bahwa rekrutmen kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Aceh dilakukan secara sistematis dan inklusif melalui pelatihan kepemimpinan berbasis nilai keagamaan dan keterampilan politik, didukung mentor serta jaringan sosial. Begitu juga kebijakan kuota 30% perempuan membuka ruang partisipasi yang lebih luas, diperkuat oleh peran bidang perempuan dan ketahanan keluarga (BPKK) melalui program pelatihan dan mentoring. Namun, tantangan berupa budaya patriarki, kurangnya kepercayaan diri, keterbatasan pengalaman politik, beban domestik, serta akses terbatas pada dana dan jaringan politik masih menjadi hambatan utama, yang membatasi potensi perempuan untuk berpartisipasi dan sukses di ranah politik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, pertama, Partai Keadilan Sejahtera di Aceh perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik melalui edukasi komprehensif, komunikasi yang personal dan terbuka, serta kegiatan sosial yang melibatkan kader perempuan untuk membangun citra positif partai dan mengurangi stigma masyarakat. Kedua, Masyarakat diharapkan lebih terbuka terhadap peran perempuan dalam politik dengan mengurangi prasangka, memberikan kesempatan yang setara, dan mendukung terciptanya lingkungan politik yang inklusif dan setara. Ketiga, Peneliti diharapkan mendalami pengaruh faktor budaya, struktur partai, dan dinamika sosial terhadap rekrutmen perempuan, serta melakukan studi komparatif antar partai untuk memahami tantangan dan peluang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ambarwati, A. (2021). *Perilaku dan teori organisasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif* (Qualitative research approach). Deepublish.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.

JURNAL

- Aminah, A., Mulyani, S., & Ubaidullah, U. (2020). Pola Rekrutmen Bacaleg Perempuan Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh. *Jurnal Sosiologi USK* (Media Pemikiran & Aplikasi), 14(2), 221-238.
- Areza, T. S. M., Akbar, F., Ikhsan, E., & Nasution, M. (2023). Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1276-1286.
- Arrasyid, S., & Abidin, Z. (2020). Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998–2017. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 5(1).
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir)*. Penerbit K-Media.
- Aulia, J. Penyusunan Kerangka Berpikir Dalam Penelitian. *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*.
- Ballington, J. (2004). Strengthening internal political party democracy: Candidate recruitment from a gender perspective.
- Crowder-Meyer, M. (2013). Gendered recruitment without trying: How local party recruiters affect women's representation.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1-17.
- Haryati, E. (2017). Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 101-110.

- Melli, A. W. (2021). Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Mengembangkan Bahasa Anak Autis Di Tk Intan Pertiwi Tanjung Senang Bandar Lampung (*Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung*).
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi politik perempuan pada lembaga legislatif (Studi tentang pencalonan perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019). *ARISTO*, 9(2), 203-228.
- Preece, J. R., Stoddard, O. B., & Fisher, R. (2016). Run, Jane, run! Gendered responses to political party recruitment.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.
- Zahara, Raudhatul Rahmi, and Muzaffarsyah Teuku. "Partisipasi Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 (Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)." *JPP (Jurnal Politik dan Pemerintahan)* 3.1 (2018): 81-98.

SKRIPSI

- Amier, A. (2023). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia (Studi Kasus Tentang Perolehan Suara Perempuan Pada Partai Demokrasi Ndongesia Perjuangan Di Kota Makassar) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Damayanti, T. (2021). Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024) (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan).
- Jahar, A. S. Peran partai Keadilan sejahtera (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Lebak.
- Mahtuti, T. (2018). Konsistensi PKS Dalam Memperjuangkan Harkat Dan Martabat Perempuan (Studi Pada: DPD PKS Lampung Utara) (Doctoral dissertation).
- Majid, A. (2017). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Penerbit Aksara Timur.
- Ramadhani, G. A. (2019). Pola rekrutmen politik kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).

SITUS WEB

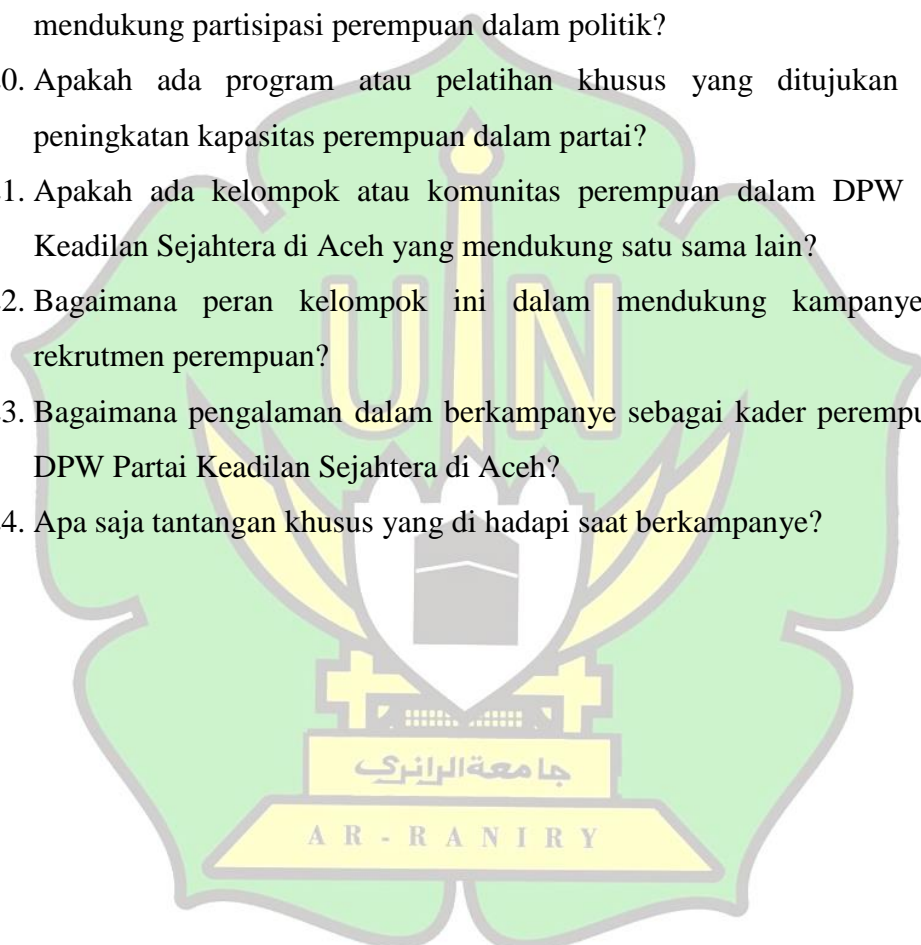
Dewan pengurus pusat, partai keadilan sejahtera, <https://pks.id/>.



Lampiran 1. 1 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ada perkembangan gender dalam proses rekrutmen kader di DPW Partai Keadilan Sejahtera di Aceh?
2. Apakah ada perbedaan dalam cara perekrutan antara kader laki-laki dan perempuan?
3. Apa yang memotivasi untuk terlibat dalam politik dan bergabung dengan DPW Partai Keadilan Sejahtera di Aceh?
4. Bagaimana dukungan keluarga dan teman mempengaruhi keputusan untuk bergabung dengan partai ini?
5. Bagaimana menilai tingkat ambisi politik dibandingkan dengan rekan-rekan perempuan lainnya di partai?
6. Bagaimana pengalaman saat pertama kali direkrut sebagai kader di DPW Partai Keadilan Sejahtera di Aceh?
7. Apakah proses perekrutan tersebut adil, terbuka, dan transparan?
8. Apa saja inisiatif yang dilakukan oleh partai untuk menarik perempuan agar bergabung sebagai kader?
9. Bagaimana tanggapan terhadap proses rekrutmen yang dilakukan oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera di Aceh?
10. Apakah proses rekrutmen tersebut sudah memenuhi harapan?
11. Apa yang bisa diperbaiki dari proses rekrutmen kader perempuan di DPW Partai Keadilan Sejahtera di Aceh?
12. Bagaimana tanggapan mengenai jumlah dan kualitas kader perempuan yang direkrut oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera di Aceh?
13. Bagaimana sistem pemilu yang ada mempengaruhi kesempatan perempuan untuk direkrut sebagai kader dalam DPW Partai Keadilan Sejahtera di Aceh?
14. Apakah sistem pemilu saat ini memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik?
15. Bagaimana budaya lokal di Aceh mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik?

16. Apakah ada norma-norma budaya yang menjadi hambatan bagi perempuan untuk bergabung dengan partai politik?
17. Bagaimana kebijakan DPW Partai Keadilan Sejahtera di Aceh dalam mendukung rekrutmen perempuan?
18. Apakah dukungan oleh partai dalam karir politik?
19. Bagaimana struktur organisasi DPW Partai Keadilan Sejahtera di Aceh mendukung partisipasi perempuan dalam politik?
20. Apakah ada program atau pelatihan khusus yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas perempuan dalam partai?
21. Apakah ada kelompok atau komunitas perempuan dalam DPW Partai Keadilan Sejahtera di Aceh yang mendukung satu sama lain?
22. Bagaimana peran kelompok ini dalam mendukung kampanye dan rekrutmen perempuan?
23. Bagaimana pengalaman dalam berkampanye sebagai kader perempuan di DPW Partai Keadilan Sejahtera di Aceh?
24. Apa saja tantangan khusus yang di hadapi saat berkampanye?



Lampiran 1.2 Surat Penelitian

7/22/24, 9:43 AM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1326/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/07/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
PKS (DPW)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYUKUR HALDI WIJAYA / 200801014**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Pagar air, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **REKRUTMEN KADER PEREMPUAN DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juli 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 20 Januari 2025

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 1.3 Dokumentasi Wawancara



Wawancara peneliti dengan Ibu Tati Meutia Asmara (politisi perempuan PKS Aceh sekaligus sebagai Ketua DPRK Banda Aceh)



Wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Abdullah Rahil Bin Irwansyah (caleg laki-laki PKS Aceh)



Wawancara peneliti dengan Ibu Dian Huriana (staf DPW PKS bidang pemenangan pemilu dan pilkada sekaligus caleg perempuan)



Wawancara peneliti dengan Bapak Fauzi (ketua DPD PKS Aceh barat)



Wawancara peneliti dengan Bapak Ismunandar (staf DPW PKS sekaligus Bidang Kaderisasi)



Wawancara peneliti dengan Ibu Nova Zahara, (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di DPW PKS Aceh).